



PEMETAAN INVESTASI DI PROVINSI MALUKU UTARA

Kerjasama antara :
BAPPEDA PROVINSI MALUKU UTARA
DAN
LPPM UNIVERSITAS KHAIRUN
TAHUN 2013



KATA PENGANTAR

Untuk melaksanakan amanat otonomi daerah, maka peran Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan potensi daerah menjadi sangat penting. Pemerintah Daerah sebagai Regulator dan Fasilitator dalam pencapaian keberhasilan pembangunan menjadi *central* kam menggali dan memanfaatkan potensi daerah yang ada.

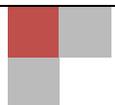
Provinsi Maluku Utara sebagai daerah otonom memiliki peran aktif guna meningkatkan hasil pembangunan dan daya saing ekonomi daerah. Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara secara rata-rata hingga tahun 2012 masih di atas 6 – 7%, hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di daerah ini termasuk tinggi.

Pemetaan investasi dilakukan untuk menyajikan sektor-sektor yang berpotensi untuk dikembangkan yang dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi di Provinsi Maluku Utara.

Akhirnya semoga riset ini dapat dijadikan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan investasi di Maluku Utara.

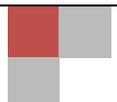
Ternate, Agustus 2013

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
(BAPPEDA) Provinsi Maluku Utara

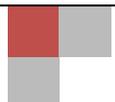


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	3
1.3. Ruang Lingkup Pekerjaan	4
1.4. Output Kegiatan	7
1.5. Sistematika Pelaporan	8
BAB II . TINJAUAN TEORITIS	9
2.1. Analisis Investasi	9
2.2. Hubungan Investasi & PDRB	11
2.3. Potensi Investasi Persektor	14
BAB III. METODE PENELITIAN	18
3.1. Jenis Data Yang Dibutuhkan	18
3.2. Tehnik Pengumpulan Data	19
3.3. Analisis Data	20
BAB IV. GAMBARAN UMUM MALUKU UTARA	27
4.1. Aspek Geografis & Tipologi Wilayah	27

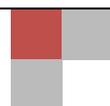


4.2.	Aspek Kependudukan	32
4.3.	Aspek Sosial	37
4.4.	Tata Ruang	52
4.5.	Kondisi Sosial & Budaya	53
BAB V. PEMBAHASAN		54
5.1.	Investasi Sektor Listrik	54
5.2.	Investasi Sektor Air Bersih	55
5.3.	Investasi Sektor Pendidikan	56
5.4.	Investasi Sektor Perdagangan	59
5.5.	Investasi Sektor Perbankan	61
BAB VI. KESIMPULAN & REKOMENDASI		64
6.1.	Kesimpulan	64
3.2.	Rekomendasi Kebijakan	64
DAFTAR PUSTAKA		66

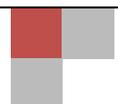


DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Investasi Penanaman Modal	13
Tabel 4.1.	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis aman di Provinsi Maluku Utara, 2009	31
Tabel 4.2.	Luas Wilayah, Jumlah & Kepadatan Penduduk menurut Kabupaten Dan Kota di Maluku Utara, 2010.....	33
Tabel 4.3.	Penduduk berumur 15 tahun keatas Yang bekerja menurut lapangan Usaha & jenis kelamin di Provinsi Maluku Utara, 2010	35
Tabel 4.4.	Penduduk berusia 15 tahun keatas Yang bekerja menurut tingkat Pendidikan tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Maluku Utara, 2010	38
Tabel 4.5.	Jumlah Murid TK s/d SMTA Dan jumlah Guru TK s/d SMTA Dan Rasio Jumlah Murid Terhadap Guru di Provinsi Maluku Utara.....	39
Tabel 4.6.	Jumlah Murid TK Raudatul Athfal- MA & Jumlah Raudatul Athfal- MA Dan Rasio murid terhadap guru Di Provinsi Maluku Utara, 2010.....	41
Tabel 4.7.	Angka Kematian Ibu Di Provinsi Maluku Utara, 2010	45
Tabel 4.8.	Proporsi Kelahiran yang ditolon Tenaga Kesehatan di Provinsi Maluku Utara,2009-2010	49

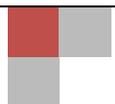


Tabel 4.9.	Jumlah Penganut Agama Di Provinsi Maluku Utara, 2010	51
Tabel 5.1.	Angkatan Kerja di Provinsi Maluku Utara menurut tingkat pendidikan	57
Tabel 5.2.	Jumlah Sekolah Dasar Kab/Kota di Provinsi Maluku Utara,tahun 2012	58
Tabel 5.3.	Investasi Perbankan di Provinsi Maluku Utara ,2009-2012	62
Tabel 5.4.	Posisi Pinjaman Perbankan Sektor Ekonomi Prov.Maluku Utara,2009-2012	63



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1.	Persentase Pertumbuhan penduduk Prov. Maluku Utara, 20 0-2010	34
Gambar 4.2.	Persentase Penduduk Berusia 15 tahun Keatas yang bekerja menurut status Pekerjaan & Jenis Kelamin di Prov. Maluku Utara, 20 9	36
Gambar 4.3.	Keluhan Kesehatan Penduduk Provinsi Malut, Tahun 2009	44
Gambar 4.4.	Jumlah Kematian Maternal Provinsi Malut, 2011	46



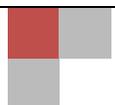
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam perspektif Pemerintah Republik Indonesia, ada dua tujuan utama kebijakan otonomi daerah. Pertama, untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Kedua, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah (Lihat Konsideran UU No. 32 Tahun 2004).

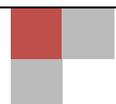
Untuk melaksanakan amanat otonomi daerah maka peran pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi daerah menjadi sangat penting. Keberadaan pemerintah daerah yang merupakan regulator dan fasilitator dalam pencapaian keberhasilan otonomi daerah menjadi pusat (*central*) dalam menggali dan memanfaatkan potensi lokal yang ada. Tentunya keberhasilan ini didukung pula oleh semua komponen daerah yang memiliki keterkaitan dengan pengoptimalan potensi daerah. Tanpa adanya kerjasama yang baik antar komponen daerah secara keseluruhan maka pelaksanaan otonomi daerah akan mengalami hambatan. Pada akhirnya seluruh komponen yang terkait (pemerintah daerah, swasta, perguruan tinggi dan masyarakat) merupakan satu kesatuan yang saling menopang dalam rangka menggapai keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.



Propinsi Maluku Utara sebagai daerah otonom memiliki peran aktif guna meningkatkan pembangunan dan daya saing ekonomi daerahnya. Laju pertumbuhan ekonomi Propinsi Maluku Utara secara rata-rata hingga tahun 2012 masih di atas 6-7% hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Propinsi Maluku Utara termasuk tinggi bahkan bila dibandingkan dengan Provinsi lain di Indonesia. PDB Indonesia tanpa migas 6,52% dan Propinsi Maluku Utara mencapai pertumbuhan 6,03%.

Sementara itu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Maluku Utara atas dasar harga konstan pada triwulan IV-2010 tercatat sebesar Rp 778,35 milyar rupiah, tumbuh 6,99% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini melambat disbanding triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 7,52% (yoy).

Melihat pertumbuhan dan Nilai PDRB yang baik, maka potensi tumbuhnya ekonomi Propinsi Maluku Utara masih sangat tinggi. Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah yang semakin baik dari masa ke masa maka potensi daerah yang prospektif harus mendapatkan skala prioritas dalam pembangunan. Dengan adanya potensi ekonomi yang cukup besar di Propinsi Maluku Utara maka sudah selayaknya porsi penanaman modal dapat berkembang. Daya tarik yang dimiliki oleh Propinsi Maluku Utara sebagai Provinsi yang masih sangat muda dan memiliki sumberdaya yang memadai merupakan nilai yang besar untuk dapat berkembang dimasa mendatang. Untuk itu diperlukan sebuah pemetaan wilayah yang dapat memberikan gambaran mengenai potensi dan peluang dalam berinvestasi di Propinsi Maluku Utara yang dapat menjadi acuan sehingga penanaman modal akan memiliki tren kecenderungan menaik dari tahun ke tahunnya.

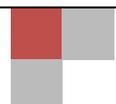


1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

1.2.1. Maksud

Maksud dari kegiatan Penyusunan Peta Investasi Propinsi Maluku Utara adalah :

- 1) Tersedianya peta investasi Kota Propinsi Maluku Utara berdasarkan potensi dan karakteristik wilayah baik sumberdaya manusia dan sumberdaya alam, kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat berdasarkan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Propinsi Maluku Utara dengan memperhatikan kebijakan ruang investasi RTRW Propinsi Maluku Utara
- 2) Sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka :
 - (a) Mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif dan percepatan peningkatan investasi di Propinsi Maluku Utara berdasarkan klasifikasi sektoral yang dapat dikembangkan sesuai dengan studi RUPM Propinsi Maluku Utara dan Kebijakan Ruang Investasi RTRW Propinsi Maluku Utara Menentukan bentuk, sifat dan jenis kegiatan investasi yang dapat dilakukan di Propinsi Maluku Utara berdasarkan klasifikasi sektoral Propinsi Maluku Utara.
 - (b) Menentukan lokasi investasi yang sesuai dengan bidang usaha berdasarkan klasifikasi sektoral dengan memperhatikan kebijakan ruang investasi RTRW Propinsi Maluku Utara.
 - (c) Membantu dan memberikan informasi kepada para pelaku ekonomi dalam memilih bidang usaha/kegiatan dan lokasi usaha yang diinginkan sesuai ruang investasi RTRW Propinsi Maluku Utara ;
 - (d) Memberikan pedoman dalam bidang perizinan bagi rencana kegiatan usaha/investasi yang akan dilakukan oleh setiap pelaku ekonomi untuk menanamkan modalnya Propinsi Maluku Utara.



1.2.2. Tujuan

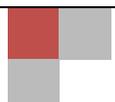
Sedangkan tujuan dari Penyusunan Peta Investasi Propinsi Maluku Utara adalah untuk :

- a. Tersedianya informasi potensi investasi yang ada di Propinsi Maluku Utara sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas bagi para pelaku ekonomi dalam rangka menentukan sektor kegiatan yang berpotensi untuk dikembangkan dan adanya jaminan hukum terhadap lokasi investasi berdasarkan kebijakan ruang investasi RTRW Propinsi Maluku Utara
- b. Tersedianya informasi lokasi investasi berdasarkan klasifikasi sektoral Propinsi Maluku Utara dan kebijakan ruang investasi RTRW Propinsi Maluku Utara.
- c. Tersedianya data penunjang dalam rangka pengembangan potensi investasi dimasing-masing sektoral dan lokasi investasi, seperti data tentang luas lahan, jaringan air bersih, jaringan listrik, infrastruktur jalan dan sebagainya.
- d. Sebagai informasi bidang perizinan dalam penerbitan dokumen perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Propinsi Maluku Utara.

1.3. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1.3.1. Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah dari *Penyusunan Peta Investasi Propinsi Maluku Utara* adalah meliputi Propinsi Maluku Utara dengan seluruh kegiatan ekonomi pada 9 Kabupaten/Kota yang ada di Propinsi Maluku Utara berdasarkan batas administrasi dan batas ruang wilayah (tata ruang).



1.3.2. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan Penyusunan Peta Investasi Propinsi Maluku Utara terdiri dari beberapa tahapan antara lain :

a. Tahapan persiapan dan survey

Pada tahap ini lebih difokuskan pada :

- 1). Kegiatan mobilisasi personil,
- 2). Pemahaman masing-masing tenaga ahli terhadap studi yang akan dilakukan serta penjadwalan kegiatan sesuai dengan program kerja;
- 3). Survey lapangan baik dilakukan pada lokasi studi, insitusi pemerintahan terkait, pengusaha/swasta atau sumber lain yang diperlukan.

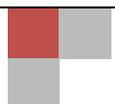
b. Tahapan identifikasi :

1). Identifikasi potensi

- Identifikasi potensi investasi berdasarkan klasifikasi sektor dengan memperhatikan karakteristik wilayah (meliputi: kondisi sumberdaya alam, sosial, ekonomi, budaya dan demografi,)
- Identifikasi potensi investasi berdasarkan lokasi lahan dengan memperhatikan kebijakan uang investasi RTRW Propinsi Maluku Utara

2). Identifikasi sarana dan prasarana pendukung

- Identifikasi sarana dan prasarana pendukung pengembangan potensi investasi termasuk kapasitas ketersediaannya. Sarana dan prasarana pendukung dimaksud antara lain: jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan telephone, infrastruktur jalan, fasilitas umum dan fasilitas sosial.



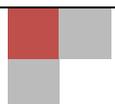
c. *Studi kepustakaan*

Studi kepustakaan dilakukan dalam rangka memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan peta potensi investasi. Studi kepustakaan diutamakan dari hasil kajian/studi yang dilakukan di wilayah Propinsi Maluku Utara, selain itu juga peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan studi ini. Adapun sumber data yang diperlukan antara lain :

- Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanaman modal (investasi) berlaku baik Pusat maupun Daerah;
- RPJPD dan RPJMD Propinsi Maluku Utara;
- Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Maluku Utara Tahun 2010 – 2030.
- Studi Rencana Umum Penanaman Modal Propinsi Maluku Utara Tahun 2010-2015.
- Data- data statistik pendukung lainnya.

d. *Tahapan Penyusunan Kegiatan*

- Tahapan penyusunan merupakan rangkaian kegiatan menyusun data dan informasi tentang potensi investasi Propinsi Maluku Utara berdasarkan klasifikasi sektoral (RUPM Propinsi Maluku Utara) dan peruntukan ruang investasi (RTRW Propinsi Maluku Utara) serta mengurai pula sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan untuk setiap sektor kegiatan yang dapat dikembangkan untuk dapat menarik para pelaku ekonomi untuk dapat menanamkan modalnya.
- Pembuatan peta (mapping) yang merupakan penjelasan dari hasil penyusunan potensi investasi, sehingga memudahkan pihak lain untuk membacanya. Peta dibuat pada kertas ukuran A0 dan A3 yang disusun dalam bentuk album peta.



e. *Tahapan Konsultasi (Pembahasan)*

Pada tahap ini pihak konsultan melakukan konsultasi hasil penyusunan dokumen kepada Tim Teknis maupun Pihak Pemilik Kegiatan (BAPPEDA Propinsi Maluku Utara). Konsultasi dilakukan pada masing-masing tahapan penyusunan dokumen (Laporan Pendahuluan, Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir).

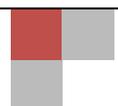
f. *Tahapan Finalisasi*

Tahap finalisasi adalah tahap penyusunan Laporan Akhir Peta Propinsi Maluku Utara berdasarkan saran dan masukan yang diberikan oleh Tim Teknis.

1.4. OUTPUT KEGIATAN

Output dari kegiatan ini adalah dokumen hasil pemetaan peluang investasi yang dapat dilakukan di Propinsi Maluku Utara yang terdiri dari :

- 1) Laporan Pendahuluan, berisikan rencana kegiatan dan metodologi yang akan dikembangkan oleh pihak konsultan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Laporan ini akan diserahkan sebanyak 15 buku untuk selanjutnya dibahas dengan tim teknis untuk mendapatkan masukan dan penyempurnaan.
- 2) Laporan Kemajuan, berisikan gambaran kondisi eksisting wilayah studi, potensi ekonomi wilayah Propinsi Maluku Utara per sektor dan peluang investasi yang dapat dilakukan. Laporan ini akan diserahkan sebanyak 15 buku untuk selanjutnya dibahas dengan tim teknis untuk mendapatkan masukan dan penyempurnaan
- 3) Laporan Akhir, berisikan laporan potensi investasi Propinsi Maluku Utara berdasarkan klasifikasi sektoral (RUPM Propinsi Maluku Utara) dan peruntukan ruang investasi (RTRW Propinsi Maluku Utara) serta mengurai pula sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan untuk setiap sektor



kegiatan yang dapat dikembangkan untuk dapat menarik para pelaku ekonomi untuk dapat menanamkan modalnya. Laporan ini akan diserahkan sebanyak 20 buku untuk selanjutnya dibahas dengan tim teknis untuk mendapatkan masukan dan penyempurnaan

- 4) Album Peta, laporan berupa peta ini berisikan potensi ekonomi wilayah dan peluang investasi yang dapat dilakukan di Propinsi Maluku Utara. Album peta ini terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu :
 - Album Peta Investasi (Penanaman Modal) ukuran A0 sebanyak 2 set
 - Album Peta Investasi (Penanaman Modal) ukuran A3 sebanyak 3 set

1.5. SISTEMATIKA PELAPORAN

Secara sistematis, Laporan Penyusunan Peta Investasi Propinsi Maluku Utara ini diuraikan dalam 5 (lima) bab yang disajikan secara ringkas yang antara lain sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan

Berisikan uraian mengenai latar belakang, maksud dan tujuan kegiatan, ruang lingkup kegiatan dan sistematika penyusunan laporan.

Bab 2 Tinjauan Teoritis

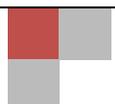
Bab ini akan menguraikan konsep-konsep dasar tentang Penyusunan Peta Investasi Propinsi Maluku Utara

Bab 3 Gambaran Umum Propinsi Maluku Utara.

Bab ini akan menguraikan gambaran umum wilayah studi, baik dari aspek administrasi, kondisi kependudukan maupun ekonomi wilayah.

Bab 4 Pemetaan Investasi

Bab ini berisi kajian potensi dan peluang investasi yang dapat dikembangkan Propinsi Maluku Utara.



BAB II

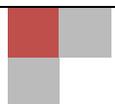
TINJAUAN TEORITIS

2.1. ANALISIS INVESTASI

Dalam konsep ekonomi makro, penimbunan atau penumpukan modal selalu dianggap investasi. Secara fisik pengertian modal itu sendiri adalah seluruh peralatan dan prasarana fisik yang digunakan dalam proses produksi, seperti tanah, mesin, kendaraan, gedung, jalan, jembatan dan lain-lain. Ditinjau dari sisi penggunaan barang, investasi merupakan nilai semua penggunaan barang modal baru yang dapat menghasilkan satu unit output dan berumur lebih dari satu tahun. Sedangkan untuk barang/alat produksi yang berumur kurang dari satu tahun atau habis dipakai dalam proses produksi tidak digolongkan sebagai barang investasi, melainkan sebagai barang input antara (*intermediate input*).

Cakupan dari pengertian barang modal baru dalam konsep ini adalah : 1. Barang modal yang baru diproduksi serta baru digunakan, baik berasal dari produksi daerah yang bersangkutan maupun yang berasal dari luar negeri dan luar daerah. 2. Barang modal bekas yang berasal dari luar daerah maupun dari luar negeri.

Pada sistem pembukuan neraca perusahaan, yang dimaksud dengan modal adalah harta tetap (*fixed assets*). Modal sering disebut sebagai *gross capital stock* yaitu akumulasi/penumpukan modal baru dari tahun ke tahun yang digunakan untuk menghasilkan produksi. Secara umum perusahaan dianggap telah mempertimbangkan kondisi ekonomi makro dalam membuat keputusan mengenai



akumulasi stok barang. Jika ada kecenderungan harga bahan baku akan melonjak, perusahaan bisa memutuskan untuk melakukan akumulasi bahan baku. Jadi perubahan stok dalam hal ini bisa dikategorikan sebagai bagian dari pembentukan modal investasi. Ditinjau dari sisi konsumsi, pengertian investasi adalah konsumsi pada waktu atau periode yang akan datang (*future consumption*), atau konsumsi yang ditangguhkan untuk masa yang akan datang. Ditinjau dari sisi jumlah permintaan (*aggregate demand*), investasi merupakan selisih pembelian barang modal baru dengan penjualan barang modal lama yang dilakukan oleh perusahaan, pemerintah dan lembaga swasta nirlaba. Jadi investasi adalah tambahan neto atas barang modal.

Untuk mendapatkan gambaran mengenai perkembangan investasi dari waktu ke waktu ada 3 macam cara (berdasarkan 3 gugus data) yang bisa dilakukan, yaitu :

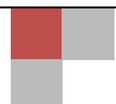
1. Dengan menyoroti kontribusi pembentukan modal domestik bruto dalam konteks permintaan agregat, yakni melihat sumbangan dan perkembangan variabel I dalam identitas pendapatan nasional :

$$Y = C + I + G + (X-M)$$

Data **I** merupakan data keseluruhan investasi domestik bruto, meliputi baik investasi oleh swasta (PMDN dan PMA) maupun oleh pemerintah.

2. Dengan mengamati data-data PMDN dan PMA.
Dengan cara ini berarti kita hanya mengamati investasi oleh kalangan dunia usaha swasta saja.
3. Dengan menelaah perkembangan dana investasi yang disalurkan oleh dunia perbankan.

Cakupan data dengan cara ini tentu saja relatif lebih terbatas, karena belum memperhitungkan modal sendiri yang ditanamkan oleh investor. Namun demikian, sebagai salah satu pendekatan untuk memperoleh gambaran



perihal perkembangan investasicara terakhir ini sama sahihnya dengan kedua cara sebelumnya.

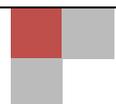
2.1.1. Investasi Pemerintah

Pengeluaran pemerintah dapat dikategorikan sebagai investasi dan pendukung investasi. Sebagai investasi, pengeluaran pemerintah biasanya digunakan oleh badan milik pemerintah/daerah atau pengeluaran pemerintah untuk kredit usaha, sedangkan pengeluaran pemerintah sebagai pendukung investasi berupa fasilitas infrastruktur (jalan, listrik, dll), keamanan dan stabilitas ekonomi.

Perkembangan usaha dan masukya investasi ke Propinsi Maluku Utara juga sangat dipengaruhi oleh pembangunan infrastruktur yang dilakukan daerah guna mendukung kelancaran usaha yang ada. Penyediaan fasilitas transportasi, jalan, listrik, dan fasilitas lainnya yang mendukung dunia usaha menjadi faktor pendukung dunia usaha, karena investor akan menghitung dahulu nilai ekonomi investasi yang akan dilakukannya. Infrastruktur menjadi salah satu perhitungan nilai ekonomi karena ketidak tersedianya infrastruktur yang tersebut akan mengakibatkan high cost economic (tingginya biaya operasional usaha).

2.2. HUBUNGAN INVESTASI DENGAN PDRB

Pertumbuhan produksi pada umumnya dipengaruhi oleh perkembangan (pertumbuhan) faktor-faktor produksinya (modal, tenaga kerja, tanah, dan teknologi). Analisis terhadap pertumbuhan ekonomi seyogianya dihubungkan dengan perkembangan faktor-faktor produksinya. Salah satu metode yang dikembangkan untuk menghubungkan pertumbuhan faktor produksi dengan pertumbuhan ekonomi adalah *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR). ICOR menghubungkan besarnya pembentukan modal tetap bruto dengan penambahan Produk Domestik Bruto (PDB). Banyak studi menunjukkan bahwa pertumbuhan



ekonomi suatu negara erat kaitannya dengan tingkat produktivitas penggunaan modal, sehingga walaupun ada kritik, penggunaan ICOR untuk menghubungkan pertumbuhan ekonomi dengan penggunaan faktor produksi dapat dipertanggungjawabkan. Disamping itu ICOR juga dapat digunakan untuk menunjukkan efisiensi suatu perekonomian dalam menggunakan barang modal. Dalam perencanaan makro ICOR dapat digunakan untuk menaksir besarnya kebutuhan modal yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi tertentu.

Dengan menggunakan rumus pertumbuhan yang dijabarkan oleh *Horrod Domar* diketahui :

$$G = \Delta Y / Y = S / K$$

Dimana :

G = Pertumbuhan

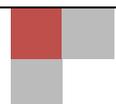
S = Tingkat tabungan (% PDRB)

K = ICOR

Y = PDRB

Persamaan diatas menjelaskan hubungan antara laju pertumbuhan ekonomi ($g = \Delta Y / Y$), mempunyai hubungan terbalik dengan ICOR tetapi mempunyai hubungan yang searah dengan ratio tabungan dengan pendapatan ($s = S / Y$). Selain itu dapat juga dikatakan laju pertumbuhan ekonomi merupakan hasil bersama antara kuantitas investasi (yang tercermin pada s) dan kualitas investasi (yang tercermin pada ICOR).

Semakin kecil angka ICOR berarti investasi yang dilakukan semakin efisien. Misalnya untuk investasi pada tahun dan kondisi yang sama, di Kabupaten A ICOR = 5, sedangkan di Kabupaten B ICOR = 7. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mendapatkan tambahan PDRB Rp1,00 di Kabupaten A memerlukan tambahan investasi sebesar Rp5,00. Sedangkan di Kabupaten B diperlukan



investasi sebesar Rp.7,00. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa untuk melakukan investasi, kondisi perekonomian di Kabupaten A lebih kondusif dan lebih efisien dibandingkan dengan Kabupaten B.

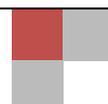
2.2.1. Investasi Penanaman Modal

Tabel 2.1. Kontribusi Investasi Persektor

	Tahun		
	2006	2007	2008
PMDN			
Sektor Primer	3.29	18.85	18.85
Sektor Sekunder	65.46	54.79	54.79
Sektor Tersier	31.25	26.36	26.36
PMA			
Sektor Primer	1.46	1.37	7.60
Sektor Sekunder	50.18	49.12	45.96
Sektor Tersier	48.35	49.51	46.44

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Investasi dari dalam negeri atau Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) dan dari luar negeri atau Penanam Modal Asing (PMA). Data investasi yang ada pada tahun 2008 adalah 708,849,893 milyar Rupiah, dan dilihat dari kontribusinya persektor, PMDN banyak melakukan investasi pada sektor sekunder yaitu sektor industri pengolahan, sektor listrik dan air bersih dan sektor bangunan. Sedangkan untuk PMA, sektor sekunder dan tersier memiliki kontribusi yang hampir sama.



2.3. POTENSI INVESTASI PERSEKTOR

Sebelum memetakan potensi investasi yang ada di Propinsi Maluku Utara, harus diketahui terlebih dahulu sektor ekonomi yang memiliki keunggulan dengan daerah lain dan memiliki kompetensi untuk dikembangkan. Untuk menganalisis hal ini diperlukan metode analisis Location Question dan Shift-Share.

2.3.1. Location Question

Menurut Bendavid-Val seperti dalam Aswandi dan Kuncoro (2002), analisis LQ digunakan untuk menentukan sektor/sektor unggulan atau basis perekonomian daerah secara relative terhadap daerah referensinya, dengan formulasi seperti dalam persamaan berikut ini:

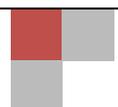
$$LQ = \frac{v_i/v_t}{V_i/V_t}$$

Dimana:

- LQ : besarnya nilai LQ sektor I disuatu daerah
- V_i : jumlah output/value added sektor i disuatu daerah
- v_t : total jumlah output/value added disuatu daerah
- V_i : jumlah output/value added sektor I diwilayah referensi
- V_t : total jumlah output/value added diwilayah referensi

Kriteria pengukuran LQ menurut Bendavid-Val:

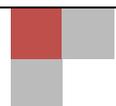
- a) Bila $LQ > 1$: menunjukkan tingkat spesialisasi sektor tertentu di tingkat daerah lebih besar dari sektor yang sama diwilayah referensi, artinya sektor tersebut merupakan sektor unggulan/basis didaerah dan potensial untuk dikembangkan sebagai penggerak perekonomian daerah.
- b) Bila $LQ < 1$: menunjukkan tingkat spesialisasi sektor tertentu ditingkat daerah lebih kecil dari sektor yang sama diwilayah referensi, berarti sektor tersebut



dengan suatu referensi (dengan cakupan wilayah lebih luas) dalam dua titik waktu. Pemahaman struktur aktifitas dari hasil analisis Shift-share juga menjelaskan kemampuan berkompetisi (competitiveness) aktifitas tertentu di suatu wilayah secara dinamis atau perubahan aktifitas dalam cakupan wilayah lebih luas. Hasil analisis ini akan menjelaskan kinerja (performance) kabupaten/kota dan membandingkannya dengan kinerja dalam wilayah referensinya.

2.2.3 Perhitungan Kebutuhan Investasi dengan ICOR

Konsep ICOR pada awalnya dikembangkan oleh *Sir Ray Harrod* dan *Evsey Domar* yang lebih dikenal dengan *Harrod-Domar Model*. Pada intinya teori ini menunjukkan adanya hubungan antara peningkatan stok kapasitas produksi dan kemampuan masyarakat untuk menghasilkan output. Semakin tinggi peningkatan stok kapasitas produksi (ΔK) semakin tinggi pula tambahan output (ΔY) yang dapat dihasilkan. Menurut teori, ICOR dapat diukur melalui bentuk fisik ataupun nilai. Namun untuk memudahkan dalam praktek perhitungan, ICOR selalu dilakukan dalam bentuk nilai. Bukan merupakan suatu hal mudah untuk memperkirakan koefisien COR ataupun ICOR guna mendapatkan gambaran tentang kebutuhan investasi pada masa yang akan datang. Penyebabnya, karena keadaan koefisien tersebut tidak hanya ditentukan oleh investasi yang ditanamkan saja, akan tetapi dipengaruhi pula oleh tingkat penerapan dan perkembangan teknologi dalam proses produksi, seperti kapasitas produksi yang digunakan. Secara matematis ICOR dinyatakan sebagai rasio antara pertambahan modal (investasi) terhadap tambahan output, atau dinotasikan sebagai berikut :



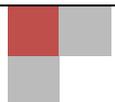
$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y}$$

Keterangan :

ΔK = Penambahan Investasi

ΔY = Pertumbuhan Output

Sejalan dengan pengertian di atas, akan diberikan ilustrasi sebagai berikut. Misalkan dalam suatu periode waktu ditanamkan investasi sebesar Rp. 200 milyar, dan tambahan output yang dihasilkan dari adanya investasi tersebut adalah Rp. 40 milyar. Maka ICOR yang diperoleh adalah Rp. 200 milyar / Rp. 40 milyar = 5. Nilai koefisien ICOR ini menunjukkan bahwa untuk memperoleh tambahan satu unit output diperlukan investasi sebesar lima unit. Sebenarnya tambahan output tidak hanya disebabkan oleh investasi yang ditanamkan, akan tetapi juga oleh faktor-faktor lain di luar investasi, seperti tambahan tenaga kerja dan kemajuan teknologi. Tetapi, dalam penerapannya untuk menghitung ICOR dipakai asumsi bahwa tidak ada faktor lain yang memengaruhi output selain investasi, dengan kata lain faktor-faktor diluar investasi dianggap konstan. Investasi yang dimaksud disini tidak hanya investasi yang ditanamkan dalam satu tahun, tetapi juga investasi-investasi pada periode sebelumnya. Akibat dari mengkonstantakan pengaruh teknologi, maka dalam penerapannya besaran ICOR sebaiknya dipakai untukantisipasi kebutuhan investasi jangka waktu yang tidak terlalu panjang.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. KEBUTUHAN DATA

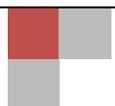
Dalam kegiatan Penyusunan Peta Investasi Propinsi Maluku Utara diperlukan data dan informasi sebagai bahan dalam merumuskan rencana tersebut. Data-data dan informasi yang di butuhkan dilakukan dengan menggunakan metode Survey yaitu survey instansional (sekunder) dan lapangan (primer). Adapun teknik inventarisir data dapat dilakukan dengan beberapa metoda, diantaranya dengan wawancara baik dengan aparat pemerintah maupun dengan masyarakat setempat, pengamatan lapangan dan sebagainya. Data yang diperoleh dari proses survey tersebut dalam bentuk narasi, tabel dan peta. Adapun jenis data atau informasi tersebut adalah sebagai berikut :

1) Data Primer

Teknik pengumpulan data primer umumnya dilakukan dengan survey langsung ke lapangan. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan data-data atau informasi yang tidak diperoleh dari survey instansional (sekunder). Pada umumnya cara pengumpulan data ini dilakukan untuk mengetahui secara langsung kondisi lingkungan, baik secara fisik, sosial, ekonomi maupun budaya dari wilayah studi yang dimaksud, sehingga dapat diperoleh gambaran situasi dari wilayah studi.

2) Data Sekunder

Sumber data sekunder dapat diperoleh dari instansi-instansi yang terkait dengan kegiatan penyusunan Peta Investasi ini dan dari berbagai literatur yang



ditemui. Pada umumnya data yang diperoleh antara lain berupa data narasi (tertulis), tabel, grafik, peta dan sebagainya.

3.2. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Terdapat beberapa jenis pengumpulan data yang umum digunakan dalam kegiatan perencanaan, dan pada umumnya dalam penerapan teknik pengumpulan data tersebut perlu mempertimbangkan beberapa hal, antara lain tipe permasalahan yang diteliti, fasilitas dan biaya yang tersedia, waktu studi yang telah ditetapkan, situasi dan kondisi yang ada, serta tingkat keakuratan yang diharapkan. Adapun jenis-jenis teknik pengumpulan data tersebut adalah :

1. Teknik Komunikasi atau Wawancara Langsung

Dalam hal ini, peneliti bertindak sebagai pengumpul data, sedang pihak lain yang dihubungi bertindak sebagai informasi. Dengan teknik ini terjadi komunikasi tanya jawab, baik lisan maupun tertulis.

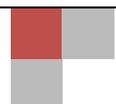
2. Teknik Observasi

Pada dasarnya teknik observasi sama dengan teknik komunikasi. Perbedaannya ialah pada cara pengisian daftar isian dan daftar pertanyaan atau kuesioner. Pada teknik komunikasi pengisian dilakukan oleh informan, sedangkan pada teknik observasi dilakukan oleh peneliti.

3. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka, peneliti mempelajari data, baik kuantitatif maupun kualitatif melalui sumber dokumenter (laporan, monografi daerah, buku ilmiah, dan lain-lain).

Cara ini, selain baik untuk mencari data tertulis, juga merupakan langkah permulaan pengumpulan data lebih lanjut. Data yang terkumpul didalam telaah



pustaka merupakan data awal atau informasi awal sebelum peneliti melakukan survei lapangan.

4. Teknik Survey Lapangan

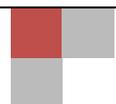
Untuk menangkap pesan yang diberikan oleh data tertulis secara benar (atau mendekati kebenaran) perlu dilakukan pengenalan langsung atas daerah perencanaan. Dengan kata lain, dibutuhkan survey langsung atas keadaan daerah perencanaan secara menyeluruh. Hal ini dapat dilakukan dengan cara : mengamati kondisi lapangan secara keseluruhan, meninjau seluruh daerah perencanaan dari udara, atau meninjau beberapa bagian daerah perencanaan yang dianggap dapat memberi gambaran daerah secara keseluruhan.

3.3. ALAT ANALISIS DATA

4.3.1. *Metode Shift Share Analysis*

Tujuan analisis ini adalah untuk menentukan kinerja atau produktifitas kerja perekonomian daerah dibandingkan dengan perekonomian nasional. Teknik ini membandingkan laju pertumbuhan sektor-sektor di daerah dengan laju pertumbuhan perekonomian nasional serta sektor-sektornya, dan mengamati penyimpangan-penyimpangan dari perbandingan yang dilakukan.

Analisis *shift-share* juga membandingkan perbedaan laju pertumbuhan berbagai sektor (industri) di daerah kita dengan wilayah nasional. Akan tetapi, metode ini lebih tajam dibandingkan dengan metode LQ. Metode LQ tidak memberikan penjelasan atas faktor penyebab perubahan sedangkan metode *shift-share* memperinci penyebab perubahan atas beberapa variabel. Analisis ini menggunakan metode pengisolasian berbagai faktor yang menyebabkan perubahan struktur industri suatu daerah dalam pertumbuhannya dari satu kurun waktu ke kurun waktu berikutnya. Hal ini meliputi penguraian faktor penyebab

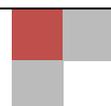


pertumbuhan berbagai sektor di suatu daerah tetapi dalam kaitannya dengan ekonomi nasional. Ada juga yang menamakan model analisis ini sebagai *industrial mix analysis*, karena komposisi industri yang ada sangat mempengaruhi laju pertumbuhan wilayah tersebut. Artinya, apakah industri yang berlokasi di wilayah tersebut termasuk ke dalam kelompok industri yang secara nasional memang berkembang pesat dan bahwa industri tersebut cocok berlokasi di wilayah itu atau tidak. Analisis *shift share* dapat menggunakan variabel lapangan kerja atau nilai tambah. Akan tetapi, yang terbanyak digunakan adalah variabel lapangan kerja karena datanya lebih mudah diperoleh. Apabila menggunakan nilai tambah maka sebaiknya menggunakan data harga konstan.

Pertambahan lapangan kerja (*employment*) regional total (ΔE_r) dapat diurai menjadi komponen *shift* dan komponen *share*. Komponen *share* sering pula disebut komponen *national share*. Komponen *national share* (N) adalah banyaknya pertambahan lapangan kerja regional seandainya proporsi perubahannya sama dengan laju pertumbuhan nasional selama periode studi. Hal ini dapat dipakai sebagai kriteria bagi daerah yang bersangkutan untuk mengukur apakah daerah itu tumbuh lebih cepat atau lebih lambat dari pertumbuhan nasional rata-rata.

Komponen "*shift*" adalah penyimpangan (*deviation*) dari *national share* dalam pertumbuhan lapangan kerja regional. Penyimpangan ini positif di daerah-daerah yang tumbuh lebih cepat dan negatif di daerah-daerah yang tumbuh lebih lambat merosot dibandingkan dengan pertumbuhan lapangan kerja secara nasional. Bagi setiap daerah, *shift netto* dapat dibagi menjadi dua komponen, yaitu *proportional shift component* (P) dan *differential shift component* (D).

Proportional shift component (P) kadang-kadang dikenal sebagai komponen struktural atau *industrial mix*, mengukur besarnya *shift regional netto*



yang diakibatkan oleh komposisi sektor-sektor industri di daerah yang bersangkutan. Komponen ini positif di daerah-daerah yang berspesialisasi dalam sektor-sektor yang secara nasional tumbuh cepat dan negatif di daerah-daerah yang berspesialisasi dalam sektor-sektor yang secara nasional tumbuh dengan lambat atau bahkan sedang merosot.

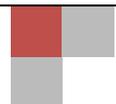
Differential shift component (D) kadang-kadang dinamakan komponen lokasional atau regional adalah sisa kelebihan. Komponen ini mengukur besarnya *shift regional netto* yang diakibatkan oleh sektor-sektor industri tertentu yang tumbuh lebih cepat atau lebih lambat di daerah yang bersangkutan daripada tingkat nasional yang disebabkan oleh faktor-faktor lokasional intern. Jadi, suatu daerah yang mempunyai keuntungan lokasional seperti sumber daya yang melimpah/efisien, akan mempunyai *differential shift component* yang positif, sedangkan daerah yang secara lokasional tidak menguntungkan akan mempunyai komponen yang negatif.

Kedua komponen *shift* ini memisahkan unsur-unsur pertumbuhan regional yang bersifat ekstern dan yang bersifat intern. *Proportional shift* adalah akibat dari pengaruh unsur-unsur luar yang bekerja secara nasional, sedangkan *differential shift* adalah akibat dari pengaruh faktor-faktor yang bekerja khusus di daerah bersangkutan.

Pertambahan lapangan kerja regional sektor *i* dapat diperinci atas pengaruh dari *National Share*, *Proportional Share*, dan *Differential shift*, dalam notasi aljabar hal itu adalah

$$\Delta E_{r,i,t} = (N s_i + P_{r,i} + D_{r,i})$$

Peranan *National share* adalah seandainya pertambahan lapangan kerja regional sektor *i* tersebut sama dengan proporsi pertambahan lapangan kerja nasional secara rata-rata. Hal ini dapat dituliskan sebagai berikut:



$$Ns_{i,t} = E_{r,i,t-n} (E_{N,t} / E_{N,t-n}) - E_{r,i,t-n}$$

Proportional share adalah melihat pengaruh sektor *i* secara nasional terhadap pertumbuhan lapangan kerja sektor *i* pada region yang dianalisis. Hal ini dapat dituliskan sebagai berikut.

$$P_{r,i,t} = \{(E_{N,i,t} / E_{N,i,t-n}) - (E_{N,t} / E_{N,t-n})\} \times E_{r,i,t-n}$$

Hal yang sama dapat juga diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$P_{r,i,t} = \left(\frac{\Delta E_{N,i,t}}{E_{N,i,t-n}} - \frac{\Delta E_{N,t}}{E_{N,t-n}} \right) E_{r,i,t-n}$$

Differential shift menggambarkan penyimpangan antara pertumbuhan sektor *i* di wilayah analisis terhadap pertumbuhan sektor *i* secara nasional. Hal ini dapat dituliskan sebagai berikut.

$$D_{r,i,t} = \{E_{r,i,t} - (E_{N,i,t} / E_{N,i,t-n}) E_{r,i,t-n}\}$$

Hasil yang sama dapat juga diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$D_{r,i,t} = \left(\frac{\Delta E_{r,i,t}}{E_{r,i,t-n}} - \frac{\Delta E_{N,i,t}}{E_{N,i,t-n}} \right) \times E_{r,i,t-n}$$

Dimana:

Δ = Pertambahan, angka akhir (tahun *t*) dikurangi dengan angka awal (tahun *t - n*)

N = *National* atau wilayah nasional/wilayah yang lebih tinggi jenjangnya

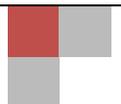
r = *Region* atau wilayah analisis

E = *Employment* atau banyaknya lapangan kerja

i = Sektor industri

t = Tahun

t-n = Tahun awal



4.3.2. Metode Location Quotient

Location quotient (kuosien lokasi) atau disingkat LQ adalah suatu perbandingan tentang besarnya peranan suatu sektor / industri di suatu daerah terhadap besarnya peranan sektor / industri tersebut secara nasional. Rumusnya adalah sebagai berikut.

$$LQ = \frac{q_i/q_r}{Q_i/Q_n}$$

Keterangan:

LQ = koefisien Location Quotient

Q_i = output sektor i nasional

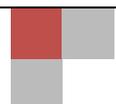
q_i = output sektor i regional

Q_n = output total nasional

q_r = output total regional

Menurut metode ini, bila koefisien LQ >1, maka sektor tersebut cenderung akan mengekspor outputnya ke wilayah lain, atau mungkin ekspor ke luar negeri, sedangkan jika nilai koefisien LQ < 1, ini berarti sektor tersebut cenderung mengimpor dari wilayah lain atau dari luar negeri. Menurut Kadariah (1985), dasar pemikiran dari penggunaan teknik LQ yang dilandasi teori ekonomi basis mempunyai makna sebagai berikut : karena industri basis itu menghasilkan barang dan jasa baik untuk pasar di daerah maupun untuk pasar di luar daerah, maka penjualan hasil ke luar daerah akan mendatangkan pendapatan daerah itu. Arus pendapatan itu menyebabkan kenaikan konsumsi maupun investasi, yang pada akhirnya menaikkan pendapatan daerah dan kesempatan kerja.

Kerangka umum studi menggunakan pendekatan input-output, berasal dari Tabel IO provinsi Maluku Utara tahun 2011. Serangkaian metode analisis meliputi:

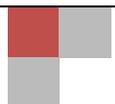


1. Menyusun tabel IO tahun 1999 hingga 2005. Prosedurnya dilakukan melalui metode RAS berdasarkan tabel IO tahun 2000 (BPS, 2004). Tahapan ini bertujuan untuk memperoleh nilai-nilai investasi dan PDB bagi perhitungan ICOR (pendekatan Harrod Domar), sebagai berikut :

$$ICOR_i = \frac{\sum_{i=1}^n K_i}{\partial Y_i (n-1)}$$

dimana K dan ∂Y adalah investasi dan perubahan PDB dalam harga konstan tahun 2000, i dalam kurun periode 2001 hingga 2011. Perhitungan nilai ICOR dilakukan pada tahun t, t-1, t-2, dan t-3 hingga ditemukan nilai ICOR yang paling relevan, sesuai prosedur BPS (2003).

1. Menyusun proyeksi pengembangan sektor pertanian selama periode 2006 hingga 2010. Proyeksi disusun atas dasar pertumbuhan PDRB masing-masing sebesar 2, 4, 6 dan 8 persen per tahun pada setiap komoditi. Dengan menggunakan kembali prinsip dasar rumus ICOR, maka dapat dihitung kebutuhan investasi (=KI) pada setiap komoditi, yakni $KI = ICOR_i \times \Delta V_i$; dimana $ICOR_i$ dan ΔV_j adalah nilai ICOR tambahan PDRB setiap komoditi.
2. Menyusun prioritas kebutuhan investasi. Hal ini dilakukan dengan melihat peran relatif komoditi melalui perhitungan nilai pengganda output,



pendapatan, dan nilai tambah. Nilai pengganda output (multiplier output, M-O_j) dirumuskan

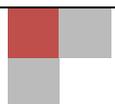
$$M-O_j = \sum_{i=1}^n \alpha_{ij}; j = 1, 2, 3, \dots, n$$

Nilai pengganda pendapatan dan nilai tambah (M-L_j) dirumuskan:

$$M-L_j = \frac{\sum_{i=1}^n L_j \times \alpha_{ij}}{L_j}; i, j = 1, 2, 3, \dots, n$$

dimana : α_{ij} = koefisien matrik kebalikan Leontif

L_j = mewakili koefisien pendapatan dan nilai tambah sektor j.



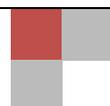
BAB IV

GAMBARAN UMUM WILAYAH

4.1. ASPEK GEOGRAFIS DAN TIPOLOGI WILAYAH

Provinsi Maluku Utara terdapat di wilayah timur Indonesia, berada di kepulauan Maluku yang dihimpit Pulau Sulawesi dan Pulau Papua (Irian Jaya), terletak di antara 30 Lintang Utara – 30 Lintang Selatan dan 1240 – 1290 Bujur Timur. Luas wilayah Provinsi Maluku Utara tercatat 145.801,10 km² dengan ibukotanya adalah Sofifi yang terletak di Pulau Halmahera. Secara administratif, provinsi ini terbagi menjadi tujuh kabupaten dan dua kota. Kabupaten/kota tersebut terdiri dari 113 kecamatan dan 1.070 desa/kelurahan. Di sebelah utara wilayah Provinsi Maluku Utara berbatasan dengan Samudera Pasifik, di sebelah timur berbatasan dengan Laut Halmahera, di sebelah barat berbatasan dengan Laut Maluku, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Seram.

Provinsi Maluku Utara merupakan provinsi kepulauan yang terdiri dari 397 buah pulau besar dan kecil. Pulau Halmahera dengan luas 18.000 km², tergolong sebagai pulau besar, sedangkan Pulau Obi (3.900 km²), Pulau Taliabu (3.195 km²), Pulau Bacan (2.878 km²), dan Pulau Morotai (2.325 km²) merupakan pulau yang ukurannya relatif sedang. Selain itu, terdapat pulau-pulau yang relatif kecil lainnya, yakni Pulau Ternate, Pulau Tidore, Pulau Makian, Pulau Kayoa, Pulau Gebe dan lain sebagainya. Dari jumlah itu, sebanyak 64 pulau telah dihuni, sedangkan 333 pulau lainnya tidak dihuni.

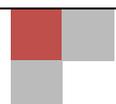


4.1.1. Topografi, Iklim, Sumberdaya Air dan Penggunaan Lahan

Sebagian besar wilayah Provinsi Maluku Utara bergunung-gunung (berada pada ketinggian antara 100–1.000 meter diatas permukaan laut) dan berbukit-bukit yang terdiri dari pulau-pulau vulkanis dan pulau karang, sedangkan sebagian pulau lainnya merupakan dataran. Daerah Provinsi Maluku Utara terbentuk oleh relief-relief yang besar, dimana terlihat palung-palung pegunungan saling bergantian dengan sangat mencolok.

Kepulauan ini terdiri dari dua lengkung yang bergerak melalui Filiphina, Sangir Talaud dan Minahasa yang dilingkupi oleh Lengkung Sulawesi dan Palung Sangihe yang berwatak vulkanis dan pada sisi lengkung Kontinen Melanesia yang bergerak dari gugusan melalui Papua (Irian) bagian utara yang berciri bukan vulkanis. Sebagai pulau yang besar, Pulau Halmahera mempunyai banyak pegunungan yang rapat mulai dari Teluk Kao, Teluk Buli, Teluk Weda, Teluk Payahe dan Dodinga. Di setiap daerah terdapat punggung gunung yang merapat ke pesisir, sedangkan pada daerah sekitar Teluk Buli (di Timur) sampai Teluk Kao (di Utara), pesisir barat mulai dan Teluk Jailolo ke utara dan Teluk Weda ke selatan dan utara ditemui daerah dataran yang luas.

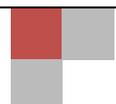
Secara umum, Provinsi Maluku Utara mempunyai tipe iklim tropis, sehingga sangat dipengaruhi oleh iklim laut yang biasanya heterogen sesuai indikasi umum iklim tropis. Di daerah ini, dikenal dua musim yakni utara-barat dan timur-selatan, yang seringkali diselingi dengan dua kali masa pancaroba di setiap tahunnya. Oleh karena itu iklimnya sangat dipengaruhi oleh lautan dan bervariasi antara tiap bagian wilayah yaitu iklim Halmahera Utara, Halmahera Tengah, Halmahera Barat, Halmahera Selatan dan Kepulauan Sula.



1. Daerah Iklim Halmahera Utara, musim hujan berada pada bulan Desember-Februari dan kemarau dalam bulan Agustus-Desember yang diselingi pancaroba pada bulan Nopember-Desember.
2. Daerah Iklim Halmahera Tengah dan Halmahera Barat; dimana dipengaruhi musim Utara pada bulan Oktober-Maret, pancaroba pada bulan April. Musim Selatan pada bulan April-September yang diselingi angin Timur dan pancaroba pada bulan September.
3. Daerah Iklim Halmahera Selatan, dipengaruhi oleh dua musim yaitu musim Utara pada bulan Oktober-Maret yang diselingi angin Barat dan pancaroba pada bulan April, musim Selatan pada bulan September diselingi angin Timur dan pancaroba dalam bulan September.
4. Daerah Iklim Kepulauan Sula; terdiri atas dua musim, musim Utara pada bulan Oktober-Maret diselingi angin Barat dan pancaroba pada bulan April dan musim Selatan pada bulan April-September, diselingi angin Timur dan pancaroba pada bulan September.

Selama tahun 2010, Stasiun Meteorologi dan Geofisika Babullah Ternate mencatat suhu udara tertinggi terjadi pada bulan Maret yakni 32,6 0C dan terendah pada bulan September yaitu 23,1 0C. Kelembaban udara rata-rata mencapai 84%. Selama 2010 terjadi hari hujan sepanjang tahun dengan intensitas beragam. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember. Penyinaran matahari terbesar (sekitar 79%) terjadi pada bulan Maret. Kecepatan angin maksimum tercatat mencapai 30 knot, terjadi dalam bulan September.

Secara keseluruhan, penggunaan lahan di Provinsi Maluku Utara didominasi oleh penggunaan lahan hutan dan lahan perkebunan. Daratan seluas 45.069,66 Km² diantaranya, merupakan lahan perkebunan dengan luas 830.683,6 Ha (8.306.836 Km²) dan luas lahan hutan 534.409,0 Ha (5.344.090 Km²), serta



selebihnya adalah lahan untuk sawah, perumahan dan permukiman, tegalan dan bangunan lainnya. Selain itu, terdapat lebih dari 50 sungai mengalir wilayah Maluku Utara. Danau di Provinsi Maluku Utara tercatat sekitar 12 danau yang tersebar di beberapa Kabupaten/Kota. Gunung Sibela merupakan gunung tertinggi di Provinsi Maluku Utara, dengan ketinggian sekitar 2.110 m di atas permukaan laut yang terletak di Kabupaten Halmahera Selatan.

4.1.2. Sumberdaya Fisik Laut

Sebagai provinsi kepulauan dengan luas laut 100.731,44 Km² (mencapai $\pm 76,28$ % dari total wilayah), wilayah Provinsi Maluku Utara memiliki potensi kelautan sangat dominan dan beragam, seperti perikanan, pariwisata (bahari), pertambangan laut dan jasa transportasi. Potensi yang tersedia pada subsektor perikanan dan kelautan (*standing stock*) sebesar 694.382,48 ton per tahun dengan potensi lestari sebesar 347.191,24 ton per tahun, dan baru dimanfaatkan sebesar 26,51 persen atau sekitar 92.052,21 ton per tahun. Jenis ikan yang tersebar di perairan Provinsi Maluku Utara adalah ikan pelagis besar (tuna, cakalang, tongkol, kakap dan tenggiri) potensi per tahun sebesar 211.590,00 ton, ikan pelagis kecil (teri, kembung, layang, selar dan julung) dengan potensi pertahun sebesar 169.834,33 ton, jenis ikan demersal (kakap merah, lencan, ekor kuning, baronang) sebesar 135.005,24 ton per tahun, ikan karang dengan potensi per tahun sebesar 97.801,78 ton, lobster dengan potensi per tahun sebesar 11.999,74 ton, cumi-cumi potensi pertahun sebesar 35.072,18 ton, udang penied potensi per tahun sebesar 26.545,26 ton.

Perairan Provinsi Maluku Utara merupakan tempat matang dan dewasa ikan sejenis cakalang dan tuna. Sesuai siklusnya, cakalang dan tuna bertelur di perairan Jepang dan dibawa arus ke selatan hingga perairan Maluku, termasuk Sulawesi dan Teluk Tomini. Sampai di perairan Indonesia, kedua jenis ikan itu



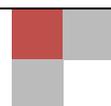
sudah siap untuk di ambil (makan). Populasi ikan yang tersedia (standing stock) diperkirakan sebanyak 268.382,5 ton per tahun (Marasabessy, et al. 2010).

Tabel 4.1. Proporsi Tangkapan Ikan yang berada dalam Batasan Biologis Aman di Provinsi Maluku Utara, Tahun 2009

Kabupaten/Kota	Produksi Ikan (ton)		JTB (80% MSY)	Proporsi tangkapan ikan dlm batasan biologis aman (%)	
	Tahun			2008	2009
	2008	2009			
Halmahera Barat	14.690,42	8.598,67		3,55	2,08
Halmahera Tengah	9.672,93	2.569,24		2,34	0,62
Kepulauan Sula	16.471,24	8.963,71		3,98	2,17
Halmahera Selatan	27.482,42	55.524,94		6,64	13,42
Halmahera Utara	12.131,15	23.372,10	413.60	2,93	5,65
Halmahera Timur	17.866,21	4.014,71		4,32	0,97
Pulau Morotai	-	2.007,76		0	0,49
Ternate	17.866,21	24.311,40		4,32	5,88
Tidore Kepulauan	14.356,60	15.990,04		3,47	3,87
Prov. Maluku Utara	143.166,39	45.352,57	413.60	34,61	35,14

Sumber : BPS dan DKP Provinsi Maluku Utara, 2010

Selain itu, potensi luas lahan sumberdaya perikanan budidaya Provinsi Maluku Utara adalah seluas 20.604 ha. Adapun areal perikanan budidaya yang telah dikembangkan sampai dengan tahun 2009 sebesar 2.718 ha. Areal perikanan budidaya tersebut, terdiri dari; budidaya laut seluas 2.176 ha, budidaya air payau seluas 271 ha, dan budidaya air tawar seluas 321 ha, sehingga pemanfaatan lahan budidaya, baru mencapai 13,43 persen dari potensi yang tersedia.

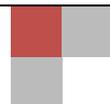


Potensi sumber daya perikanan tangkap Provinsi Maluku Utara sebesar 1.035.230,00 ton per tahun, dengan batasan biologis aman (*MSY*) sebesar 517.000 ton per tahun dan jumlah tangkapan bersih (*JTB*) sebesar 414.092 ton per tahun. Sampai dengan Tahun 2009 total tingkat pemanfaatan sumber daya ikan (*SDI*) baru mencapai 145.352,57 ton dari potensi batasan biologis aman. Kondisi ini menggambarkan proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2009 masih sebesar 35,14 persen, yang berarti masih dibawah $< 100\%$.

Jika dilihat berdasarkan wilayah kabupaten/kota seperti yang ditunjukkan Tabel 4.1, semua kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara memiliki proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis aman $< 100\%$. Nampak pula bahwa terdapat empat kabupaten yang cenderung menurun dari aspek produksi ikan pada dua tahun terakhir, yakni Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Halmahera Timur. Sedangkan lima kabupaten/kota lainnya cenderung meningkat dari aspek produksi ikannya. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa belum terjadi kelebihan penangkapan ikan (*overfishing*) di perairan Provinsi Maluku Utara. Namun demikian, dengan tingkat tangkapan ikan yang masih kecil ini mengindikasikan perlunya upaya kearah maksimalisasi hasil tangkapan ikan kedepan.

4.2. KEPENDUDUKAN

Sebagaimana tampak pada Tabel 4.2, penduduk Provinsi Maluku Utara pada tahun 2010, berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010 tercatat sebesar 1.038.087 jiwa yang tersebar di sembilan kabupaten/kota. Dari jumlah penduduk tersebut, terbesar sekitar 198.911 jiwa mendiami Kabupaten Halmahera Selatan. Secara keseluruhan, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan



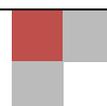
penduduk perempuan. Hal ini tercermin dari angka rasio jenis kelamin sebesar 104,87 yang berarti terdapat 105 laki-laki pada setiap 100 perempuan. Sedangkan rumah tangga penduduk sebanyak 214.379 rumah tangga, dengan rata-rata kepadatan penduduk 23,03 jiwa/km².

Tabel 4.2. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kab/Kota di Maluku, Tahun 2010.

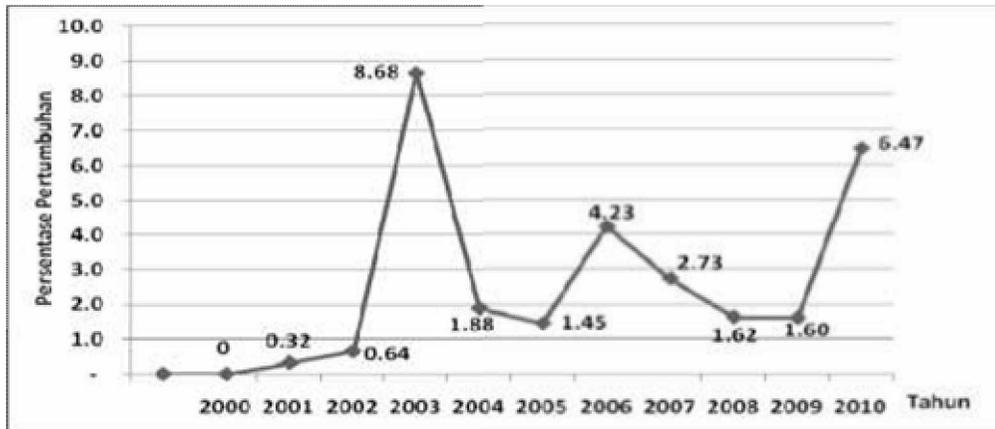
No	Kab/Kota	Luas Wilayah		Penduduk		Kepadatan Penduduk
		Km ²	%	Jumlah	%	
1	Halbar	2.612,24	5,80	100.424	9,67	38,44
2	Halteng	2.276,83	5,05	42.815	4,12	18,80
3	Kepsul	9.632,92	21,37	132.524	12,77	13,76
4	Halsel	8.779,32	19,48	198.911	19,16	22,66
5	Halut	3.132,40	6,95	161.847	15,59	51,67
6	Haltim	6.506,20	14,44	73.109	7,04	11,24
7	P. Morotai	2.314,90	5,14	52.697	5,08	22,76
8	Ternate	250,85	0,56	185.705	17,89	74,30
9	Tidore	9.564,00	21,22	90.055	8,68	9,42
Maluku Utara		45.069,66	100,00	1.038.087	100,00	23,03

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2011 (diolah)

Selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir (tahun 2000-2010), penduduk Provinsi Maluku Utara terus mengalami peningkatan, yakni pada tahun 2000 jumlah penduduk Provinsi Maluku Utara tercatat sebesar 777.503 jiwa, kemudian meningkat menjadi 1.038.087 jiwa, atau rata-rata pertumbuhan jumlah penduduk sebesar 3 persen pertahun selama periode tersebut. Pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi pada tahun 2003 sebesar 8,68 persen dan pada tahun 2010 sebesar



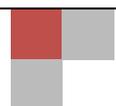
6,47 persen, sebagai akibat dari tiga faktor diantaranya, kelahiran, kematian dan migrasi. Khususnya pada tahun 2003, pertumbuhan jumlah penduduk tertinggi disebabkan meningkatnya migrasi dan arus investasi sektor pertambangan yang masuk ke kabupaten/kota hasil pemekaran (Gambar 4.1).



Sumber : Maluku Utara Dalam Angka, 2010 (diolah)

Gambar 4.1. Persentase Pertumbuhan Penduduk Provinsi Maluku Utara Tahun 2000-2010

Penduduk usia kerja di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2010 berjumlah 672.360 jiwa. Dari seluruh penduduk usia kerja, yang termasuk angkatan kerja berjumlah 437.758 jiwa atau sebesar 65,11 persen dari total jumlah penduduk usia kerja. Dilihat dari segi lapangan usaha, sebagian besar penduduk Provinsi Maluku Utara bekerja di sektor pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan yang berjumlah 238.792 orang atau 58,05 persen dari total jumlah penduduk yang bekerja. Sektor lainnya yang juga menyerap tenaga kerja cukup besar adalah sektor perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2010 adalah sebesar 6,03 persen.

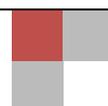


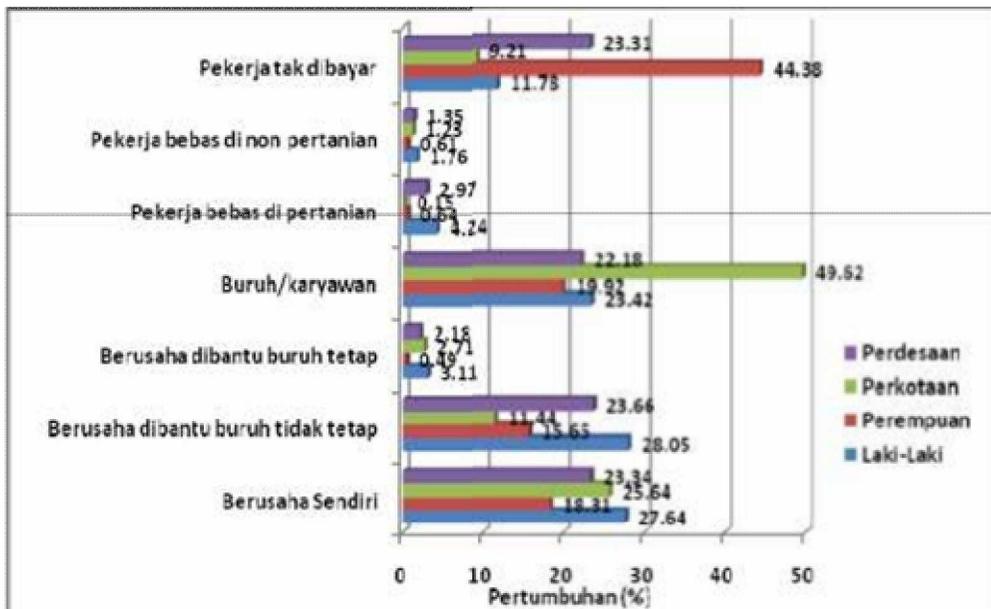
Tabel 4.3. Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin di Provinsi Maluku Utara, Tahun 2010

Lapangan Usaha	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1. Pertanian (1)	165.443	73.349	238.792
2. Industri (2,3,4 & 5)	24.751	5.170	29.921
3. Jasa-jasa (6,7,8,9)	82.102	60.546	142.648
Jumlah	272.296	139.065	411.361

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara (Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional- Agustus), 2010

Dilihat dari status pekerjaannya, persentase jumlah penduduk Provinsi Maluku Utara yang bekerja di sektor informal cukup tinggi. Jenis pekerjaan pada sektor ini, pada umumnya tidak memerlukan pendidikan tinggi maupun keahlian khusus, sebagaimana tercatat sampai dengan Agustus 2009, penduduk yang bekerja sekitar 22,2 persen yang berstatus sebagai buruh/karyawan dan penduduk yang bekerja dengan status sebagai berusaha dibantu buruh tetap atau pengusaha (*employer*) hanya sebesar 2,2 persen, selengkapnya sebagaimana tampak pada Tabel 4.3.





Sumber : BPS Maluku (Indikator Ketenagakerjaan), 2009 (diolah)

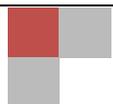
Gambar 4.2. Persentase Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Provinsi Maluku Utara, Tahun 2009

Di daerah perkotaan, terdapat 2,5 persen penduduk Provinsi Maluku Utara yang bekerja berstatus berusaha sendiri dan 49,6 persen bekerja dengan status buruh/karyawan. Di daerah pedesaan, terdapat sekitar 21,1 persen penduduk berstatus berusaha sendiri dan ada sekitar 23,9 persen berstatus berusaha dibantu buruh tidak tetap serta 28,2 persen merupakan pekerja tak dibayar. Hal ini dapat dikatakan dengan dominannya sektor pertanian di pedesaan maka pekerja tak dibayar terserap di sektor ini.

4.3. SOSIAL

4.3.1. Aspek Pendidikan

Kualitas sumber daya manusia salah satunya dapat diukur menggunakan tingkat pendidikan yang dicapai dari berbagai disiplin ilmu. Kualitas sumber daya manusia pada akhirnya menentukan produktivitas suatu wilayah, termasuk di Provinsi Maluku Utara. Sampai dengan tahun 2009, tercatat masih terdapat kesenjangan partisipasi pendidikan, baik antara perkotaan dan perdesaan, maupun antara laki-laki dan perempuan. Merujuk pada anak usia 13-15 tahun, misalnya, perbandingan angka partisipasi sekolah perkotaan dan perdesaan adalah 76,82 berbanding 57,62 persen; sementara perbandingan laki-laki dan perempuan adalah 65,70 berbanding 63,38 persen. Penduduk 10 tahun ke atas yang menamatkan pendidikan SLTA ke atas sudah mencapai 25,78 persen. Namun, masih banyak penduduk pada usia ini yang hanya tamat SD (29,99 persen) dan tamat SLTP (17,78 persen). Berdasarkan hasil SUSENAS Juli 2010, tercatat pula angka partisipasi sekolah menurut kelompok umur di wilayah ini sangat tinggi. Bagi kelompok umur 7-12 tahun dan kelompok umur 13-15 tahun masing-masing sebesar 97,23 persen dan 90,76 persen. Sedangkan kelompok umur 16-18 tahun sebesar 64,12 persen. Hal ini mengindikasikan angka buta huruf di provinsi ini sangatlah kecil.



Tabel 4.4. Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Maluku Utara, Tahun 2010

Tingkat Pendidikan	Penduduk (Orang)		Jumlah	Persentase (%)
	Laki-Laki	Perempuan		
Tidak/Belum Pernah Sekolah	6.575	4.911	11.486	2.79
Tidak/Belum Tamat SD	52.133	31.759	83.892	20.39
Sekolah Dasar/Ibtidaiyah	66.935	32.843	99.778	24.26
SMTU Umum/Tsanawiyah	51.499	22.988	74.487	18.11
SMTU Kejuruan	4.005	1.581	5.586	1.36
SMTA Umum/Aliyah	57.381	21.294	78.675	19.13
SMTA Kejuruan	14.139	4.690	18.829	4.58
Diploma I/II	3.938	7.656	11.594	2.82
Akademi/Diploma III	2.394	2.471	4.865	1.18
Universitas	13.297	8.872	22.169	5.39
Jumlah	272.296	139.065	411.361	100.00

Sumber : Maluku Utara Dalam Angka, 2010

Sebagaimana tampak pada Tabel 4.4, Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional bulan Agustus 2010, tercatat jumlah penduduk berumur 15 tahun keatas yang bekerja menurut tingkat pendidikan tertinggi di Maluku Utara sebanyak 411.361 orang, dengan tingkat pendidikan tertinggi adalah tamat SD sebesar 24,26 persen,



diikuti yang tidak tamat SD sebesar 20,39 persen, tamat SMP sebesar 18,11 persen, sedangkan mereka yang berijazah perguruan tinggi hanya sebanyak 5,39 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas sumber daya manusia di Provinsi Maluku Utara berdasarkan tingkat pendidikan sangatlah rendah.

Tabel 4.5. Jumlah Murid TK s/d SMTA dan Jumlah Guru TK s/d SMTA, dan Rasio Jumlah Murid Terhadap Guru di Provinsi Maluku Utara, Tahun 2010

No	Tingkat Pendidikan	Kabupaten/Kota					
		Halbar	Halteng	Kepsul	Halsel	Halut	Haltim
I	TK						
	Murid	688	420	663	540	420	368
	Guru	0	0	0	0	0	0
	Rasio	0	0	0	0	0	0
II	SD						
	Murid	16.860	7.173	24.365	39.440	36.135	12.394
	Guru	2.140	703	1.384	1.811	1.455	568
	Rasio	8	10	18	22	25	22
III	SMTP						
	Murid	7.132	2.466	7.828	11.514	12.307	3.725
	Guru	592	304	630	590	449	283
	Rasio	12	8	12	20	27	13
IV	SMTA						
	Murid	3.130	1.324	4.325	7.035	3.672	1.134
	Guru	261	160	270	317	226	123
	Rasio	12	8	16	22	16	9



lanjutan Tabel 4.5

No	Tingkat Pendidikan	Kabupaten/Kota		
		P. Morotai	Ternate	Tidore Kepulauan
I	TK			
	Murid	198	836	990
	Guru	0	0	0
	Rasio	0	0	0
II	SD			
	Murid	8.695	19.701	11.673
	Guru	544	1.682	1.223
	Rasio	16	12	10
III	SMTA			
	Murid	2.098	8.186	4.148
	Guru	146	820	538
	Rasio	14	10	8
IV	SMTA			
	Murid	1.642	9.193	5.368
	Guru	76	651	342
	Rasio	22	14	16

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2010

Selain itu, berdasarkan tingkat pendidikan yang dicapai, dapat ditunjukkan pula jumlah murid TK s/d SMTA dan jumlah guru TK s/d SMTA, dan rasio jumlah murid terhadap guru di Provinsi Maluku Utara Tahun 2010 seperti tampak pada Tabel 4.5 dan Tabel 4.6. Disamping itu, pada tahun 2010 juga tercatat jumlah murid, guru dan rasio SMK masing-masing adalah 12.897 siswa, 906 guru dan rata-rata rasio murid-guru sebanyak 14. Berdasarkan data pada Tabel 4.5, diperoleh



gambaran bahwa Kota Ternate merupakan wilayah yang memiliki jumlah murid dan guru yang paling banyak dalam semua tingkatan pendidikan, dengan nilai rasio jumlah murid terhadap guru sebesar 12 orang murid untuk tingkat sekolah dasar, tingkat sekolah menengah pertama rasionya sebesar 10 murid, dan sekolah menengah atas sebesar 14 orang murid.

Tabel 4.6. Jumlah Murid TK Raudatul Athfal-Madrasah Aliyah dan Jumlah Raudatul Athfal-Madrasah Aliyah, dan Rasio Murid Terhadap Guru di Provinsi Maluku Utara, Tahun 2010

No	Tingkat Pendidikan	Kabupaten/Kota					
		Halbar	Halteng	Kepsul	Halsel	Halut	Haltim
I	TK Raudatul Athfal						
	Murid	0	0	0	0	0	0
	Guru	0	0	0	0	0	0
	Rasio	0	0	0	0	0	0
II	Madrasah Ibtidaiyah						
	Murid	28	12	12	73	38	0
	Guru	67	37	19	177	114	0
	Rasio	10	12	9	11	11	0
III	Madrasah Tsanawiyah						
	Murid	733	191	767	1.649	998	0
	Guru	123	50	119	189	122	16
	Rasio	6	4	6	9	8	0
IV	Madrasah Aliyah						
	Murid	261	207	0	478	410	0
	Guru	52	49	0	93	93	0
	Rasio						

lanjutan Tabel 4.6

No	Tingkat Pendidikan	Kabupaten/Kota		
		Pulau Morotai	Ternate	Tidore Kepulauan
I TK Raudatul Athfal				
	Murid	0	0	0
	Guru	0	0	0
	Rasio	0	0	0
II Madrasah Ibtidaiyah				
	Murid	16	34	43
	Guru	50	135	158
	Rasio	8	8	9
Madrasah Tsanawiyah				
III	Murid	693	625	1.500
	Guru	80	181	212
	Rasio	9	3	7
Madrasah Aliyah				
IV	Murid	379	374	947
	Guru	36	129	125
	Rasio			

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2010

Meskipun secara umum, jumlah guru dan murid serta rasio murid terhadap untuk semua tingkatan pendidikan di wilayah kabupaten/kota lainnya tidak memiliki perbedaan yang mencolok. Namun jika dilihat berdasarkan wilayah, Kota Ternate merupakan wilayah dengan dinamika dunia pendidikan yang tinggi. Selain itu, Kota Ternate juga memiliki banyak lembaga pendidikan tinggi

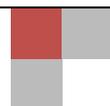


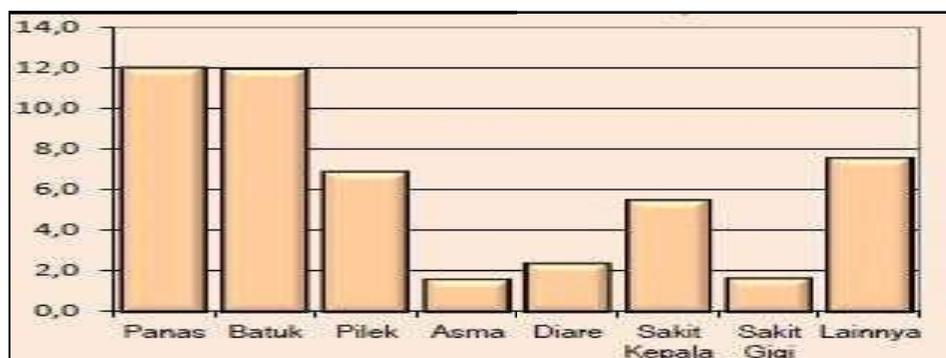
(universitas/sekolah tinggi) dan merupakan tujuan utama para lulusan sekolah menengah atas (SMTA) untuk melanjutkan pendidikannya di Provinsi Maluku Utara.

Berbeda dengan lembaga pendidikan formal ber-kurikulum lebih banyak mata pelajaran umum, seperti TK, SD, SMP dan SMTA, terdapat pula lembaga pendidikan formal lainnya ber-kurikulum mata pelajaran keagamaan dan mata pelajaran umum. Sekolah-sekolah tersebut, diantaranya Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiah dan Aliyah, sebagaimana tampak pada Tabel 4.6. Berdasarkan data pada tabel tersebut, diperoleh gambaran bahwa Kabupaten Halmahera Selatan merupakan wilayah yang memiliki jumlah murid dan guru yang paling banyak dalam semua tingkatan pendidikan. Nilai rasio jumlah murid terhadap guru di kabupaten ini sebesar sebelas orang murid untuk tingkat madrasah ibtidaiyah, tingkat madrasah tsanawiah rasionya sebanyak sembilan murid, dan madrasah aliyah sebanyak lima orang murid.

4.3.2. Aspek Kesehatan

Kondisi kesehatan penduduk di Provinsi Maluku Utara menunjukkan, bahwa dari setiap 100 penduduk, terdapat 28 orang yang mengalami keluhan kesehatan. Persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan di perkotaan relatif sedikit lebih tinggi dibandingkan perdesaan. Kondisi ini menunjukkan, bahwa kondisi kesehatan penduduk di perdesaan relatif lebih baik dibandingkan kondisi kesehatan penduduk di perkotaan.





Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, 2010

Gambar 4.3. Keluhan Kesehatan Penduduk Provinsi Maluku Utara, Tahun 2009

Keluhan kesehatan yang paling banyak dialami penduduk di Provinsi Maluku Utara adalah panas sebesar 11,97 persen penduduk, batuk sebesar 11,89 persen, pilek sebesar 6,86 persen, dan sakit kepala sebesar 5,48 persen. Adapun keluhan asma, diare, dan sakit gigi tidak lebih dari 3 persen (Gambar 4.3). Sebanyak 78 dari 100 yang mengalami keluhan kesehatan terganggu aktivitas sehari-harinya (sakit), namun hanya 30 di antaranya yang pernah berobat jalan. Lebih separuh penduduk berobat jalan ke fasilitas puskesmas, yakni sebesar 50,66 persen, dan yang berobat jalan ke fasilitas praktek dokter/poliklinik sebesar 20,20 persen. Sedangkan yang berobat jalan ke fasilitas dokter atau ke praktek tenaga kesehatan lainnya relatif berimbang, masing-masing sekitar 12 persen.

4.3.2.1. Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran Hidup

Angka Kematian Ibu (AKI) Provinsi Maluku Utara tahun 2010 berdasarkan analisis antarwaktu menurut data Profil Kesehatan Provinsi Maluku Utara adalah sebesar 345,7 per 100.000 kelahiran hidup. Hal ini berarti terjadi



kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2009 yang sebesar 230,08 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini juga masih lebih besar jika dibandingkan dengan capaian rata-rata nasional pada tahun 2007 yang berada pada angka 228 per 100.000 kelahiran hidup. Kenyataan ini, masih memerlukan kerja keras kearah pencapaian target MDGs 2015 yang diikhtiarkan pada angka 102 per 100.000 kelahiran hidup.

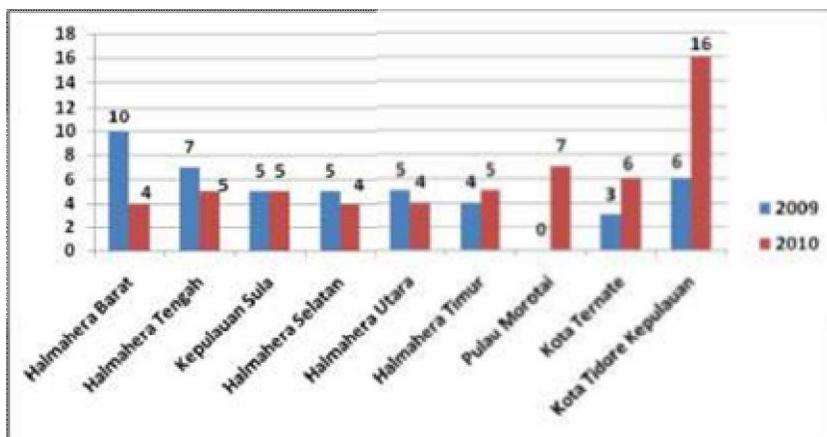
Tabel 4.7 Angka Kematian Ibu di Provinsi Maluku Utara Tahun 2010

No	Kabupaten/Kota	Jumla Lahir Hidup		Jumlah Kematian Ibu		Ranking Prioritas Intervensi
		2009	2010	2009	2010	
1	Halmahera Barat	1.891	1.819	10	4	9
2	Halmahera Tengah	831	423	7	5	6
3	Kepulauan Sula	1.167	969	5	5	5
4	Halmahera Selatan	4.617	705	5	4	7
5	Halmahera Utara	4.567	3.272	5	4	8
6	Halmahera Timur	1.021	1.443	4	5	4
7	Pulau Morotai	-	1.116	-	7	2
8	Kota Ternate	3.808	5.300	3	6	3
9	Kota Tidore Kepulauan	1.656	1.154	6	16	1
PROVINSI		19.558	16.201	45	56	
ANGKA KEMATIAN IBU (DILAPORKAN)				230,08	345,7	

Sumber : Profil Kesehatan Provinsi, 2011

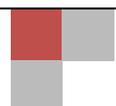


Berdasarkan data pada Tabel 4.7, dapat dilihat performa AKI yang dilaporkan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara berdasarkan Profil Kesehatan Tahun 2010 menunjukkan bahwa pada tingkatan Provinsi, jumlah kematian ibu pada tahun 2009 dan 2010 mengalami perubahan yaitu 45 kematian maternal menjadi 56 kematian maternal. Jika dilihat menurut kabupaten/kota, maka terlihat adanya fluktuasi jumlah kematian maternal yang sangat menonjol pada beberapa kabupaten/kota pada kurun waktu tersebut. Kenaikan yang sangat drastis terjadi di Kota Tidore Kepulauan yaitu dari 6 kematian maternal pada tahun 2009 menjadi 16 kematian maternal pada tahun 2010. Demikian pula yang terjadi di Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Timur yang jumlah kematian maternalnya menunjukkan peningkatan. Sebaliknya, penurunan kematian maternal yang sangat signifikan terjadi di Kabupaten Halmahera Barat yaitu dari 10 kematian maternal pada tahun 2009 menurun menjadi hanya 4 kematian maternal pada tahun 2010 (Gambar 4.4).



Sumber : Profil Kesehatan Provinsi, 2011

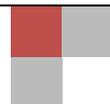
Gambar 4.4. Jumlah Kematian Maternal Provinsi Maluku Utara



Kenyataan bahwa dalam kurun waktu dua tahun jumlah kematian ibu di Provinsi Maluku Utara mengalami kenaikan dan meningkat drastis pada beberapa kabupaten, menunjukkan perlunya perhatian khusus dari instansi terkait baik di tingkat kabupaten/kota, maupun di tingkat provinsi untuk mengkaji lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab hal-hal tersebut. Selain itu karena kematian maternal merupakan hal kompleks yang melibatkan unsur-unsur lintas program dan sektor non kesehatan maka perlu kembali dikaji dan ditingkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektor dalam penanganan permasalahan kematian maternal. Intervensi kunci yang mempengaruhi AKI mencakup pelayanan antenatal yang baik, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, perawatan yang memadai untuk kehamilan resiko tinggi termasuk pencegahan ibu hamil komplikasi, program keluarga berencana untuk menghindari kehamilan dini, mengurangi tingkat aborsi tidak aman dan post abortion care serta program-program perubahan perilaku di kalangan perempuan usia subur. Disamping adanya ketersediaan fasilitas kesehatan diantaranya PUSKESMAS rawat inap yang mampu melaksanakan Pelayanan Obstetric Neonatal Emergensi Dasar (PONED), serta PUSKESMAS dan persentase Rumah Sakit kabupaten/kota yang melaksanakan Pelayanan Obstetric Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK).

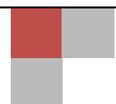
4.3.2.2. Proporsi Kelahiran yang Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih

Setiap kehamilan mempunyai risiko untuk mengalami komplikasi. Periode persalinan merupakan salah satu masa yang mengandung risiko bagi ibu hamil apabila mengalami komplikasi. Penolong persalinan oleh tenaga kesehatan dan bertempat di fasilitas kesehatan adalah syarat aman untuk mencegah terjadinya komplikasi kehamilan. Tenaga kesehatan adalah dokter spesialis, dokter umum dan bidan. Cakupan penolong persalinan oleh tenaga kesehatan adalah indikator yang



digunakan menggambarkan besarnya persentase persalinan yang aman. Persalinan yang ditolong/didampingi oleh tenaga kesehatan dianggap memenuhi persyaratan sterilisasi dan aman, karena apabila ibu mengalami komplikasi persalinan maka penanganan atau pertolongan pertama pada rujukan dapat segera dilakukan.

Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan dengan kompetensi kebidanan adalah pelayanan persalinan yang aman yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten, yaitu dokter spesialis kebidanan, dokter umum, dan bidan. Pada prinsipnya, penolong persalinan harus memperhatikan beberapa hal, yaitu 1) pencegahan infeksi; 2) metode pertolongan persalinan yang sesuai standar; 3) merujuk kasus yang memerlukan tingkat pelayanan yang lebih tinggi; dan 4) melaksanakan Inisiasi Menyusui Dini (IMD). Cakupan indikator ini untuk Provinsi Maluku Utara berdasarkan analisis antar waktu menunjukkan bahwa pada tahun 2007, kinerja indikator ini telah mencapai 37,97 persen (Susenas 2007), yang berarti mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2010 yang sebesar 52,6 persen menurut sumber yang sama. Padahal, angka ini secara Nasional telah berada pada level 79,82 persen di tahun 2010 (Susenas BPS 2010). Namun demikian, kondisi capaian ini sangat kontras jika dibandingkan dengan angka-angka yang terakomodasi dalam Profil Kesehatan Provinsi Maluku Utara pada tahun yang sama selama dua tahun terakhir. Walaupun kinerja kedua sumber data ini tidak bisa disandingkan karena perbedaan metodologis yang digunakan, akan tetapi muatan substansinya bisa untuk memperkaya analisa.



Tabel 4.8. Proporsi Kelahiran yang Ditolong Tenaga Kesehatan di Provinsi Maluku Utara, Tahun 2009-2010

Kabupaten /Kota	Ibu Bersalin						Ranking prioritas intervensi
	Jumlah		Ditolong Tenaga Kesehatan		%		
	2009	2010	2009	2010	2009	2010	
Halbar	2.688	2.566	1.048	1.557	39,0	60,7	4
Halteng	888	459	666	359	75	78,2	8
Kepsul	3.204	3.215	880	1.432	27,5	44,5	1
Halsel	3.037	4.423	2.274	2.012	74,9	45,5	2
Halut	3.550	4.121	2.549	3.188	71,8	77,4	7
Haltim	1.693	1.787	1.022	993	60,4	55,6	3
P. Morotai	892	1.182	542	896	60,8	75,8	6
Ternate	4.190	4.190	3.785	3.735	90,3	89,1	9
Kota Tikep	2.118	2.164	1.546	1.580	73,0	73,0	5
Prov. Maluku Utara	22.260	24.107	14.312	15.752	74,6	65,3	

Sumber : Profil Kesehatan Provinsi Maluku Utara Tahun, 2011

Analisis antarwaktu menurut Profil Kesehatan Provinsi Tahun 2010 menjelaskan bahwa cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan (salinakes) di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2009 sebesar 74,6 persen yang berarti telah menunjukkan penurunan dibanding cakupan tahun 2010 yang hanya sebesar 65,3 persen. Dibandingkan dengan target MDGs yang mengisyaratkan meningkat, kondisi ini mengindikasikan masih diperlukan kerja keras kearah pencapaian target

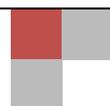


MDGs. Sedangkan berdasarkan analisis antar wilayah menurut kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara untuk dua tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 4.8.

Sebagaimana tampak pada Tabel 4.8, bahwa pada tahun 2010 cakupan tertinggi indikator ini adalah Kota Ternate sebesar 89,1 persen, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Kepulauan Sula dengan cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan sebesar 44,5 persen. Kabupaten/kota yang menunjukkan peningkatan capaian untuk dua tahun terakhir adalah Kabupaten Halmahera Barat, Halmahera Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Utara, dan Kabupaten Pulau Morotai. Adapun kabupaten/kota yang mengalami penurunan capaian kinerja indikator ini adalah Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Ternate. Sementara Kota Tidore Kepulauan menunjukkan performa konstan terhadap capaian indikator ini pada dua tahun terakhir. Kinerja indikator ini dapat juga diklasifikasikan atas dua kategori yakni kabupaten/kota yang capaiannya di atas angka cakupan Provinsi Maluku Utara (65,3 persen) terdapat 5 kabupaten/kota, yaitu Kota Ternate, Kabupaten Halmahera Tengah dan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Pulau Morotai dan Kota Tidore Kepulauan, sedangkan kabupaten/kota yang cakupan indikator ini berada di bawah angka Provinsi (65,3 persen) terdapat empat kabupaten yaitu: Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Halmahera Barat.

4.3.2.3. Aspek Agama

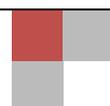
Sebagian besar penduduk Provinsi Maluku Utara menganut/memeluk agama Islam dan Kristen (Khatolik dan Protestan). Meskipun demikian, terdapat beberapa agama lainnya, diantaranya Kong Hu Cu, Hindu dan Budha yang dianut oleh sebagian penduduknya. Hal ini dapat dilihat dari tempat peribadatan yang tercatat



hingga tahun 2010 masing-masing diantaranya berjumlah 921 unit masjid, 147 Mushalla, 34 Gereja Katolik dan 483 Gereja Protestan serta 1 unit Klenteng. Perkembangan jumlah penganut agama di wilayah Provinsi Maluku Utara, dapat ditunjukkan pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9. Jumlah Penganut Agama di Provinsi Maluku Utara, Tahun 2010

Kabupaten/Kota	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	
Halmahera Barat	47.280	31.273	2.763	42	
Halmahera Tengah	35.138	9.427	419	-	
Kepulauan Sula	120.30 3	2.032	5.386	-	
Halmahera Selatan	179.68 4	59.712	2.899	-	
Halmahera Utara	85.397	42.871	9.812	-	
Halmahera Timur	53.377	33.587	462	-	
Pulau Morotai	-	54.918	128	-	
Ternate	149.96 8	15.064	1.998	63	
Tidore	82.178	13.214	133	61	
Maluku Utara	2010	753.32 5	262.098	24.000	166
	2009	753.32 5	181.417	9.381	166
	2008	846.76 0	271.452	16.640	21



lanjutan Tabel 4.9

Kabupaten/Kota		Budha	Lainnya
Halmahera Barat		-	-
Halmahera Tengah		-	-
Kepulauan Sula		-	-
Halmahera Selatan		-	-
Halmahera Utara		-	-
Halmahera Timur		-	-
Pulau Morotai		-	-
Ternate		23	120
Tidore		-	-
Maluku Utara	2010	23	120
	2009	23	120
	2008	115	29

Sumber : Kantor Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara, 2011.

4.4. TATA RUANG

Faktor yang melatar-belakangi berkembangnya sebuah wilayah adalah semakin berkembangnya aktivitas penduduk pada suatu wilayah tersebut dalam semua aspek kehidupan. Terutama kegiatan ekonomi, proses terkonsentrasinya kegiatan penduduk tersebut ke kota yang bersangkutan (aglomerasi), yang kemudian diikuti oleh perpindahan penduduk dari wilayah pedesaan ke kota tersebut (urbanisasi). Mengantisipasi pertumbuhan wilayah tersebut maka pembangunan wilayah haruslah disesuaikan dengan arah kebijakan pembangunan dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ada. Untuk Propinsi Maluku Utara pembangunan ekonomi harus secara tegas dinyatakan bahwa belum

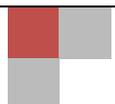


sepenuhnya menyesuaikan dengan fungsi dan peran seperti yang tertuang pada RTRW Propinsi Maluku Utara.

4.5. KONDISI SOSIAL DAN BUDAYA

Pada dasarnya masyarakat di Provinsi Maluku Utara merupakan *pro-tipe* masyarakat yang secara sosial sangat terbuka dalam menerima masyarakat luar. Hal tersebut terlihat pada berbagai sumber-sumber ekonomi didominasi oleh masyarakat luar. Namun, kondisi tersebut tidak mendorong kecemburuan yang signifikan dari masyarakat dalam melakukan hal-hal yang tidak diinginkan secara bersama.

Kondisi tersebut juga disebabkan oleh nilai-nilai budaya yang masih sangat kuat di terapkan masyarakat. Hal itu juga dikarenakan Maluku Utara memiliki akar sejarah panjang dalam menerapkan nilai-nilai budaya lokalnya. Salah satu yang masih terjaga/terawat sampai saat ini adalah kekuatan modal sosial yang masih kuat, diterapkan. Terutama sekali pada masyarakat di wilayah perdesaan.



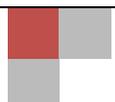
BAB V

PEMBAHASAN

5.1. INVESTASI SEKTOR LISTRIK

Listrik sudah menjadi kebutuhan dasar bagi manusia pada jaman modern seperti ini. Tanpa listrik, perkembangan dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan lambat. Oleh karenanya investasi sektor ini pasti akan diserap dengan cepat oleh pasar, di Indonesia listrik dikelola oleh perusahaan negara yaitu PT. PLN (Perusahaan Listrik Negara). Pada saat ini Pemerintah Indonesia membuka peluang perusahaan listrik baik dalam dan luar negeri untuk berinvestasi hal ini sesuai dengan UU No. 39 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, akan tetapi karena listrik menyangkut hajat hidup orang banyak maka tingkat harga listrik PT. PLN merupakan tingkat harga subsidi sehingga perusahaan listrik diluar PT. PLN tidak akan mampu bersaing.

Investasi swasta di bidang listrik banyak dilakukan pada pembangkitan daya (sumber listrik) yang kemudian dijual pada PT. PLN, seperti perusahaan pembangkit energi listrik dengan menggunakan sumber daya gas. Investasi listrik swasta lainnya biasanya untuk memenuhi kebutuhan industri perusahaan itu sendiri, misalnya pembangunan generator listrik untuk kebutuhan industri sendiri dikarenakan kurangnya daya pasokan listrik dari PT. PLN ataupun dikarenakan adanya teknologi yang lebih murah untuk digunakan. Bagi pihak swasta yang menggunakan pembangkitan listrik untuk kebutuhan sendiri haruslah memiliki izin



operasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik oleh pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten/kota tergantung ruang lingkup wilayah operasi.

Pada tahun 2010 PT. PLN merencanakan membangun pembangkit tenaga listrik sebesar 10.000 MW untuk mengurangi kebutuhan listrik hingga tahun 2015, dan pada tahun 2015 akan dibangun kembali 10.000 MW untuk kebutuhan 2020. Sehingga total rencana penambahan kebutuhan listrik untuk di Indonesia sampai tahun 2020 sebesar 20.000 MW, dan 28 persennya untuk memenuhi kebutuhan listrik di Pulau Jawa sisanya 72 persen untuk kebutuhan di luar pulau Jawa.

5.2. INVESTASI SEKTOR AIR BERSIH

Seperti halnya listrik air bersih sangat berperan bagi kehidupan manusia, dan Air bersih merupakan simbol kesehatan. Pada umumnya Masyarakat di Propinsi Maluku Utara memperoleh air dengan berbagai cara misalnya dengan tinggal dekat dengan sumber air/sungai, penggalian sumur (baik sumur gali dan sumur bor) dan pembelian air melalui perusahaan air bersih. Sedangkan penggunaan air bersih dengan pembelian air bersih melalui perusahaan air bersih merupakan solusi terbaik, kendala terbesar adalah kemampuan perusahaan untuk mendistribusikan air hingga keseluruh masyarakat.

Berdasarkan studi lapangan, disimpulkan bahwa Tingkat pertumbuhan pelanggan akan kebutuhan air bersih di Provinsi Maluku Utara sudah mengalami peningkatan yang signifikan. Hal tersebut, dapat terlihat pada beberapa perusahaan air bersih (BUMD) yang tersebar hingga ke Kecamatan-Kecamatan.

Akan tetapi, khusus pelanggan rumah tangga masih belum terjangkau, maka pengembangan pelanggan rumah tangga ini sangat berpotensi. Pelanggan rumah tangga yang berpotensi adalah pelanggan jenis perumahan dimana pelanggan perumahan memiliki tataruang yang baik dan adanya kemampuan daya beli oleh



pelanggan itu sendiri. Oleh karenanya Kabupaten yang memiliki potensi untuk investasi air bersih harus juga mempertimbangkan investasi perumahan.

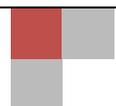
Data menunjukkan, bahwa hampir setiap tahunnya PDAM mengalami tingkat kebocoran yang tinggi hingga mencapai 50% dari total produksi, ada beberapa penyebab kebocoran:

- a. Pada saat Pengolahan, pada saat pengolahan air menjadi air bersih ada beberapa volume air yang akan terbuang.
- b. Proses distribusi, biasanya lebih disebabkan kebocoran pada pipa lama/tua ataupun rusaknya pipa akibat kerusakan jalan.
- c. Pencurian atau pemasangan illegal, banyak sekali pipa-pipa penyaluran PDAM digunakan oleh penduduk tanpa terdaftar.
- d. Akurasi pencatatan meteran, hal ini lebih disebabkan oleh kelalaian sumberdaya manusianya.

Jenis investasi air bersih ini cukup besar nilainya akan tetapi bilai nilai besar tersebut memiliki nilai tambah keuntungan yang besar juga, maka investasi jenis ini sangat berpotensi. Mengingat hampir disemua kota besar yang ada didunia saat ini sebagian besar masyarakat kotanya menggunakan fasilitas air bersih melalui perusahaan penyedia air bersih. Pada rencana tahun 2011 akan dilakukan pengembangan pembangunan produksi dan penyaluran oleh PDAM.

5.3. INVESTASI SEKTOR PENDIDIKAN

Indonesia termasuk Negara yang baru memprioritas investasi dibidang pendidikan yakni dengan mengatur belanja anggaran sebesar 20% dari penerimaannya. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Investasi pemerintah dibidang pendidikan tidaklah langsung dirasakan oleh pemerintah akan tetapi dampaknya akan terukur pada



periode 10 sampai 15 tahun kedepan, dimana Indonesia diharapkan nantinya mampu menghasilkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi dan berpendidikan.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia juga telah menganggarkan anggaran belanja daerahnya untuk bidang pendidikan sebesar 20%. Peningkatan diharapkan akan meningkatkan sumberdaya manusia yang ada di daerah ini, hal ini penting mengingat tenaga kerja yang diserap bekerja baik pada sektor formal maupun informal adalah tenaga kerja terdidik.

Tabel 5.1. Angkatan Kerja Di Provinsi Maluku Utara Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Pertumbuhan Rata2
1	SD	145,557	123,952	134,440	99,611	99,778	115,776	119,852
2	SLTP	90,705	75,392	69,024	73,517	80,073	87,095	79,301
3	SLTA	59,394	76,841	87,862	89,472	97,504	105,995	86,178
4	DI/DII	7,482	6,901	7,755	8,904	11,594	15,667	9,717
5	DIII	2,965	3,317	3,925	3,757	4,865		3,138
6	SARJANA	8,688	15,977	18,549	22,837	22,169	25,614	18,972
	Jumlah	314,791	302,380	321,555	298,098	315,983	350,147	317,159

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Provinsi Maluku Utara

Pada Tabel 4.5 memperlihatkan bahwa angkatan kerja di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2012 mencapai 350.147 orang, dengan pertumbuhan rata-rata dari tahun 2007-2012 sebesar 317.159. angkatan kerja berdasarkan tingkat pendidikan hingga tahun 2012 masih didominasi oleh tingkat pendidikan SD dan SLTA. Sedangkan, yang paling rendah adalah Diploma dan Sarjana.



Tabel.5.2. Jumlah Sekolah Dasar di Propinsi Maluku Utara Tahun 2012

No	Kabupaten/Kota	Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar			
		TK	SDN	SDS	MIN
1	Halmahera Barat	48	131	35	7
2	Halmahera Tengah	35	60		4
3	Kepulauan Sula	38	135	35	12
4	Halmahera Selatan	38	253	22	25
5	Halmahera Utara	47	178	7	19
6	Halmahera Timur	32	85	1	4
7	Pulau Morotai	4	47	18	12
8	Ternate	48	89	14	13
9	Tidore Kepulauan	60	97	1	12
	Jumlah	350	1075	133	108

Sumber : Maluku Utara dalam Angka,2012.

Jumlah sekolah dasar (SD) di Maluku Utara Tahun 2012 berjumlah 1666 terdiri dari 350 TK, 1075 SD Negeri dan 133 SD Swasta. Untuk Madrasah Ibtida'iah Negeri berjumlah 108 dan Madrasah Ibtida'iah Swasta berjumlah ..., Penyebaran Sekolah Dasar ini masih terpusat pada Kabupaten Halmahera Selatan dengan jumlah 275 Sekolah Dasar, Halmahera Utara 185 SD, Kabupaten Kepulauan Sula 170 SD, Kabupaten Halmahera Barat 166 SD. Sedangkan Kabupaten Halmahera Tengah 60 Sekola Dasar. Untuk tingkat pendidikan usia dini seperti TK masih sangat minim, karena pelayanan pendidikan usia dini minimal per 1000 penduduk memiliki TK sehingga seharusnya Provinsi Maluku Utara memiliki 350 TK. Untuk tingkat rasio guru dan murid pada tahun 2012, untuk tingkat rasio SD/Sederajat masih sangat baik yaitu masih antar 1:20 kecuali Madrasah



Ibtida'iah swasta 1:34, rasio 1:20 ini merupakan rasio yang sangat ideal dan baik, sedangkan 1:34 diperlukan penambahan guru. Sedangkan untuk TK 1: 10, ini menunjukkan bahwa terjadi kelebihan guru TK.

Berdasarkan diatas, dapat disampaikan bahwa potensi investasi sekolah swasta di Provinsi Maluku Utara masih tinggi mengingat tingkat pertumbuhan penduduk Provinsi Maluku Utara pada kisaran 1,5% - 2% tiap tahunnya, tingkat kepedulian orang tua pada masyarakat untuk bidang pendidikan lebih tinggi, Sementara fasilitas pendidikan terus dilengkapi. Sementara itu Untuk fasilitas pendidikan di Maluku Utara yang terlengkap adalah di Kota Ternate Salah satu fasilitas lainnya yang dapat mendukung Kota Ternate sebagai kota pendidikan adalah banyaknya universitas yang ada di Kota Ternate.

Peluang usaha lain yang ada adalah banyaknya usaha jasa kost, sehingga akan meningkatkan pendapatan bagi penduduk sekitar di Kota Ternate. Namun, strategi bagaimana pihak pemerintah melakukan penempatan yang tepat sehingga tidak terjadi ketimpangan pelayanan pendidikan antar Kabupaten.

5.4. INVESTASI SEKTOR PERDAGANGAN

Sebagai Provinsi yang terbilang masih sangat muda Provinsi Maluku Utara dan letak Provinsi Maluku Utara sebagai pintu gerbang menuju pasifik, maka sektor perdagangan menjadi sektor yang potensial untuk dikembangkan. Propinsi Maluku Utara juga memiliki pelabuhan peti kemas (Pelabuhan Ahmad Yani) sehingga banyak produk hasil Provinsi Maluku Utara bahkan diluar Maluku Utara di ekspor melalui pelabuhan ini.

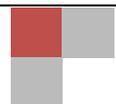
Perdagangan yang terjadi di Maluku Utara masih terpusat pada Kota Ternate dan Tobelo. Banyaknya usaha perdagangan yang ada disana karena pasar (market) sudah terbentuk, sehingga setiap orang yang ingin mencari barang pasti



tersedia disana. Image bahwa suatu tempat adalah pasar, tidaklah terbentuk sehari ataupun dua hari akan tetapi butuh proses (waktu). Proses terjadinya pasarpun dapat dipaksakan dan tidak dapat dipaksakan (mekanisme pasar yang bekerja). Biasanya sifat pasar tidak dapat dipaksakan seperti ini adalah ini adalah pasar-pasar tradisional.

Pasar-pasar tradisional tidaklah dapat dengan mudah direlokasi, yang diperlukan adalah pemberdayaan dan pemanfaatannya secara maksimal, sehingga makin berkembang dan sejalan dengan perencanaan kota. Perkembangan pasar-pasar tradisional biasanya akan menarik usaha perdagangan lainnya, bahkan tidak mungkin pasar tradisional akan berdampingan dengan pasar modern. Perlu diwaspadai adalah berkembangnya pasar modern jangan sampai mematikan aktifitas pasar tradisional. Pasar yang sifatnya dapat dipaksakan adalah jenis pasar modern seperti mini market dan mall/plaza/Departemen Store. Investasi perkembangan minimarket yang ada di Kota Ternate dan Tobelo masih sangat tinggi. Tingginya masyarakat yang berbelanja di minimarket diakibatkan oleh pelayanan yang baik dan harga yang kompetitif.

Perkembangan Mall/Plaza dan Departemen Store masih dominan didaerah pasar yang sudah terbentuk yaitu Ternate dan Tobelo, padahal perkembangan usaha dapat dilakukan dilokasi lain yang sedang mengalami perkembangan tinggi, misalnya saja di beberapa kota-kota baru yang sedang berkembang di Maluku Utara. Diperlukan peran pemerintah juga guna melaksanakan pembangunannya, misalnya saja perijinan yang mudah, pembangunan infrastruktur dan sarana transportasi yang memadai. Berkembangnya pasar-pasar modern tersebut akan memacu perkembangan daerah, sedangkan Kota Ternate maupun Tobelo dapat dijadikan sebagai tempat pedagang grosiran (skala besar).



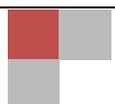
5.5. INVESTASI SEKTOR PERBANKAN

Perbankan merupakan sektor yang mampu berikan kontribusi terbesar pada PDRB Propinsi Maluku Utara yaitu sebesar ... Milyar Rupiah tiap tahunnya, untuk tingkat pertumbuhannya juga sangat tinggi rata-rata dari tahun 2009 – 2012 mencapai ..%. Tingginya penerimaa sektor perbankan tidak mesti diukur dengan banyaknya jumlah bank ataupun cabang bank yang ada di tetapi proses transaksi atau kegiatan bank itu sendiri.

Investasi perbankan biasanya melihat kondisi tingkat perekonomian suatu daerah:

- a. Tingkat pertumbuhan PDRB, tingkat pertumbuhan PDRB Propinsi Maluku Utara yang terus berada di atas 6% menunjukkan performa ekonomi yang baik.
- b. Tingkat Inflasi, Tingkat inflasi Kota Ternate pada tahun 2009 termasuk dalam kategori baik yaitu berada pada level 4,18%.
- c. Tingkat kredit macet yang terjadi dan jenis sektor usaha yang unggul, untuk jenis usaha biasanya perbankan mencari jenis usaha yang minim akan resiko macet, seperti perdagangan dan industri.

Secara umum ketiga kategori itu menjadi pertimbangan investasi perbankan, walaupun masih ada pertimbangan-pertimbangan lainnya. Berikut ini dapat dilihat kondisi perbankan yang ada di Propinsi Maluku Utara.

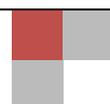


Tabel 5.3. Investasi Perbankan di Maluku Utara,2009-2012

	2009	2010	2011	2012	Pertumbuhan Rata2
Jumlah Aktiva Bank	2,579,448	2,793,365	3,835,339	4,439,419	3,411,892.75
Simpanan Giro	432,218	433,480	858,256	865,032	647,246.50
Simpanan Berjangka	1,555,455	1,725,333	2,248,263	826,663	1,588,928.50
Simpanan Tabungan	591,775	634,552	728,821	2,747,724	1,175,718.00

Sumber : Bank Indonesia, Statistik Ekonomi Keuangan Daerah Provinsi Maluku

Bila melihat kondisi aktiva dan simpanan di perbankan Maluku Utara yang terus meningkat menunjukkan tingkat kepercayaan bank oleh masyarakat sangat tinggi. Dari hal ini bisa diketahui tingkat perputaran uang yang digunakan perbankan dengan melihat tingkat pinjaman.

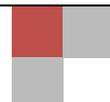


**Tabel. 5.4. Posisi Penjaman Perbankan Sektor Ekonomi
Provinsi Maluku Utara, 2009-2012**

Sektor Ekonomi	2009	2010	2011	2012	Pertumbuhan Rata2
Pertanian	69,476	7,423	34,786	53,595	41,320
Pertambangan	4,456	281	1,978	2,547	2,316
Perindustrian	4,599	20,802	38,302	41,434	26,284
Perdagangan	-	538,348	682,242	902,274	530,716
Listrik, Gas dan Air	434,194	144	79	759	108,794
Konstruksi	246,197	134,424	187,601	159,253	181,869
Pengangkutan	30,923	15,530	18,746	22,821	22,005
Jasa Dunia Usaha	18,232	25,660	81,025	130,908	63,956
Jasa Sosial Masyarakat	13,591	93,001	79,314	88,533	68,610
Lain-lain	987,727	1,490,528	2,017,692	2,474,504	1,742,613
Total	1,809,395	2,326,141	3,141,765	3,876,628	2,788,482

Sumber : Bank Indonesia, Statik Ekonomi Keuangan Daerah Provinsi Maluku Utara

Sektor perdagangan, Konstruksi dan sektor lain-lain sebagaimana data diatas, masih menjadi unggulan dalam serapan pembiayaan perbankan. Hal tersebut, dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan rata-ratanya sebesar 530.716 untuk sektor perdagangan, 181.869 untuk sektor konstruksi atau bangunan dan lain-lain sebesar 1.742.613. Perumbuhan kredit yang tinggi ini juga menjadi indikasi bahwa pertumbuhan ekonomi di Propinsi Maluku Utara masih memiliki potensi untuk dikembangkan dan memiliki daya tarik investor.



BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1. KESIMPULAN

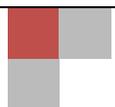
Dari hasil pembahasan diatas, disimpulkan sebagai berikut :

1. Secara umum investasi sektor-sektor ekonomi di Maluku Utara memiliki prospek yang masih sangat potensial. Terutama pada investasi Pendidikan, Konstruksi/Bangunan & Jasa-Jasa Lainnya.
2. Sektor-sektor ekonomi potensial yang belum memberi kontribusi terhadap perkembangan pembangunan ekonomi daerah, harus di dorong investasinya, sehingga memberikan manfaat secara ekonomi yang baik. Misalnya, sektor pertanian, industry pengolahan, dan air,gas dan listrik.

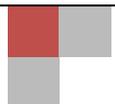
6.2. REKOMENDASI KEBIJAKAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka disampaikan Rekomendasi kebijakan kepada pemerintah daerah, sebagai berikut :

1. Pemanfaatan potensi ekonomi yang potensial pada sektor-sektor ekonomi di Maluku Utara harus dioptimalkan. Misalnya, investasi pada sektor pertanian, Industri Pengolahan, dan Pariwisata agar mampu

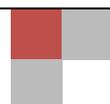


- meningkatkan atau mendorong pembangunan ekonomi wilayah di Provinsi Maluku Utara.
2. Dibutuhkan kebijakan regulasi investasi yang mampu mendorong pemanfaatan sektor-sektor ekonomi produktif di Maluku Utara secara optimal dan *sustainability*. Sehingga, tetap memberikan manfaat keberlanjutan ekonomi jangka panjang.



DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincoln. 1999. '*Ekonomi Pembangunan*'. Edisi keempat, BPFE Yogyakarta
- Azis, Iwan Jaya. 2000. '*Ilmu Ekonomi Regional dan beberapa Aplikasinya di Indonesia*'. Lembaga penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Bendavid-Val, Avrom. 1991. *Regional and Local Economic Analysis for Practitioners*. Praeger Publisher, New York and London, Fourth Edition.
- Hoover, Edgar M. 1975. '*An Introduction to Regional Economics*. Alfred A. Knopf, New York, Second Edition.
- Harry W. Richardson, *Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Regional*, Terjemahan oleh Paul Sitohang, Lembaga Penerbit FE UI, 1991.
- Iwan Nugroho dan Nuhfil Hanani. 2006. *Analisis ICOR Komoditi untuk Perhitungan Kebutuhan Investasi Sektor Pertanian*. Laporan Penelitian Fundamental, Dirjen Dikti, Jakarta. Surat Perjanjian No: 226/SP3/PP/DP2M/II/2006 (1 Feb 2006)
- Jhingan, M.L. *The Economics of Development and Planning*, Vicas Publishing House, New Delhi, 1983.
- Nuhfil Hanani dan Iwan Nugroho. 2006. *Kebutuhan Investasi Sektor Pertanian Berbasis Pengembangan Komoditi: Pendekatan input-output*. AGRIVITA FPUNIBRAW (Juni 2006) 28(2): 114-126.
- Nuhfil Hanani dan Iwan Nugroho. 2004. *Kebutuhan Investasi untuk Pengembangan Sektor Pertanian: Suatu pendekatan Input-output*. AGRIVITA FP-UNIBRAW (Juni 2004) 26(2):161-171
- Kuncoro, Mudrajad, *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*, UPPAMPYKPN, Yogyakarta.



PPSK – BI, *Daya Saing Daerah, Konsep dan Pengukurannya di Indonesia*, BPFE Yogyakarta, 2002

Williamson, O. E. 1995. The institutions and governance of economic development and reform. Proceeding of the World Bank Annual Conference on Development Economics 1994. IBRD-World Bank, Washington, DC. 171-197.

